

INVESTASI PENDIDIKAN PADA SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Global



INVESTASI PENDIDIKAN PADA SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Global

Dr. Atik Rusdiani, M.Pd.I., dkk*



INVESTASI PENDIDIKAN PADA SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Global



Dr. Atik Rusdiani, M.Pd.I.
Dr. Pujiati, M.Pd.
Rahma Dianti Putri, M.Pd.

INVESTASI PENDIDIKAN
Pada Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan
Mutu Pendidikan Global

Dr. Atik Rusdiani, M.Pd.I
Dr. Pujiati, M.Pd
Rahma Dianti Putri, M.Pd



ppku
pt. pena persada kerta utama

PT. PENA PERSADA KERTA UTAMA

**INVESTASI PENDIDIKAN
Pada Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan
Mutu Pendidikan Global**

Penulis:

Dr. Atik Rusdiani, M.Pd.I
Dr. Pujiati, M.Pd
Rahma Dianti Putri, M.Pd

ISBN: 978-623-167-626-9

Design Cover:

Yanu Fariska Dewi

Layout:

Hasnah Aulia

PT. Pena Persada Kerta Utama

Redaksi:

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah.

Email: penerbit.penapersada@gmail.com

Website: penapersada.id. Phone: (0281) 7771388

Anggota IKAPI: 178/JTE/2019

All right reserved

Cetakan pertama: 2024

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa
izin penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul **“INVESTASI PENDIDIKAN PADA SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN GLOBAL”**. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini.

Menghadapi globalisasi yang kompetitif dan penuh tantangan itu memerlukan modal dari kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai investasi pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis investasi pendidikan pada sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu pendidikan global dan korelasinya

Pada buku ini akan membahas tentang (a) investasi pendidikan; (b) sumberdaya manusia yang unggul dan berkualitas; (c) peningkatan mutu pendidikan global;. Melalui buku ini diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan investasi di bidang pendidikan khususnya pada sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu pendidikan global.

Penulis tentu menyadari jika buku ini masih belum cukup sempurna. Penulis mengharapkan kritik maupun saran guna penyempurnaan buku ini. Semoga Tuhan YME membalas jasa semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini, dengan harapan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 HUMAN CAPITAL	7
A. <i>Theory of human capital</i>	7
B. <i>Human Capital Investmen</i>	8
BAB 3 QUALITY OF EDUCATION	17
A. Definisi Mutu Pendidikan	17
B. Manfaat Mutu bagi Pendidikan	19
BAB 4 INVESTASI PENDIDIKAN PADA SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN GLOBAL	22
A. Prioritas Pendidikan Sebagai Investasi Jangka Panjang	22
B. Tujuan Kurikulum Inti Pendidikan	52
BAB 5 KESIMPULAN	64
DAFTAR PUSTAKA	65

BAB 1

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu bangsa ditandai dengan majunya kesempatan mendapatkan pendidikan yang luas dan berkualitas bagi masyarakatnya. Pendidikan yang berkualitas dan dinikmati secara luas oleh setiap anggota masyarakat merupakan usaha bangsa untuk memperoleh kualitas dirinya. Dengan kualitas sumber daya manusia yang didapat melalui pendidikan, (Tilaar, 1999 :34) maka bangsa itu akan sanggup hidup secara tangguh dalam masyarakat dunia yang ditandai dengan kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kompetisi secara ketat. Kehidupan yang kompetitif dan penuh tantangan itu memerlukan modal kemampuan manusia yang berkualitas, yaitu kualitas sumber daya manusia masa kini yang menjadi kunci utama untuk meraih masa depan di era globalisasi. (Rasyid, 2015)

Menghadapi globalisasi yang berkompetitif dan penuh tantangan itu memerlukan modal dari kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas, sebab sumber daya manusia merupakan kunci utama untuk meraih masa depan, Pada konteks manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan, maka keunggulan itu perlu dikenali dan dikembangkan sebagai nilai tambah. Keunggulan sumber daya manusia Indonesia sebagai nilai tambah sangat dibutuhkan dalam menghadapi kehidupan yang kompetitif dan penuh tantangan. Sumber daya manusia Indonesia yang unggul itu tidak hanya unggul pada kemampuan pemahaman kognitif akan tetapi juga pada kemampuan afektif dan psikomotorik, yang tercermin dalam komitmen, tabiat, perilaku, sikap, akhlak dan punya hatinurani terhadap masyarakat. Untuk melahirkan manusia unggul itu, diperlukan suatu arah kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pendidikan sebagai investasi masa depan. Sebagai investasi masa depan bangsa, maka pendidikan merupakan program yang berkelanjutan dan sistemik yang dikemas dalam berbagai program kebijakan, yang dimulai dari pendidikan anak usia dini,

pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai dengan pendidikan tinggi. Untuk itu semua diperlukan: a) arah dan substansi pendidikan yang jelas; b) keunggulan manusia sebagai investasi masa depan; c) redesign pendidikan di Indonesia; dan d) pendidikan untuk semua anak bangsa. (Rasyid, 2015) hal ini dilakukan sebagai laju perkembangan perekonomian.

Banyak faktor-faktor penggerak laju pertumbuhan perekonomian terutama kualitas sumber daya manusia. Salah satu sektor yang kerap menjadi sorotan publik sebagai akibat penurunan kualitas SDM adalah pendidikan (Purba, 2010). Teori human capital mengasumsikan bahwa pendidikan formal merupakan instrumen terpenting untuk menghasilkan masyarakat yang memiliki produktifitas yang tinggi (Lisnawati, 2007). Pendidikan sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas (Sudarsana, 2016). Pendidikan memiliki kontribusi yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi, dimana human capital menjadi penggerak perekonomian utama pada suatu bangsa. Pembangunan nasional menjadi salah satu bentuk investasi pemerintah dalam hal pengembangan sumber daya manusia (Fajar & Mulyanti, 2019) Untuk itu, investasi pendidikan dapat mengurangi ketidakpastian mengenai masa depan generasi selanjutnya untuk dapat semakin bersaing dengan pasar kerja yang lebih luas (Bahri, 2012)

Manfaat dari Investasi sumber daya manusia dapat dirasakan setelah manusia tersebut merasakan keuntungan dari produktivitasnya. (Bahri, 2012) Teori Investasi Modal Manusia Menyatakan bahwa setiap asset yang diinvestasikan diharapkan akan memberikan hasil dikemudian hari, atau yang disebut dengan Capital. Investasi modal manusia disebut juga sebagai investasi sumber daya manusia, sebagai suatu teori diakui pada awal tahun 1960-an, pada saat Schult (1961) menulis artikel tentang " Investment in Human Being ". Teori Human Capital menjadi Baku setelah Becker (1964) menulis buku mengenai " Human Capital ", yang antara lain berisikan pengembangan teori investasi sumber daya manusia dan analisa Rate of Return to Investment and Training. (Chenery dkk.,

1988) Sejak itu konsep Human Capital telah mendominasi pengembangan teori ekonomi sumber daya manusia. Investasi modal manusia didasari pemikiran bahwa seseorang dianggap atau dapat menginvestasikan dirinya melalui peningkatan pendidikan sekolah dan pelatihan serta kegiatan pendidikan lainnya. (Bahri, 2012)

Tujuan utama dari pendidikan tersebut berarti menciptakan pertumbuhan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM), dimana secara potensial Indonesia mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang cukup untuk dikembangkan dan di lain pihak dihadapkan dengan berbagai kendala, khususnya di bidang ketenagakerjaan seperti pengangguran pengangguran salah satunya yaitu pengangguran terdidik terutama pada persaingan global. (Sari, 2013). Persaingan global mengharuskan setiap Negara memiliki proiduktivitas nasional yang tinggi. Agar dapat memenangkan persaingan tersebut setiap masyarakat harus menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi (Iptek) dan keterampilan serta keahlian professional yang dibutuhkan untuk memacu peningkatan nilai tambah berbagai sektor industri dan pemerataan ekonomi secara berkelanjutan (Sudarsana, 2016). (Fajar & Mulyanti, 2019)

Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang diperlukan oleh suatu instansi atau organisasi. Pendidikan juga merupakan pengembangan kemampuan umum untuk dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti tingkat produktivitas yang tinggi, maka perlu dilakukan suatu kebijakan yaitu kebijakan pendidikan dan pelatihan. Ini karena dengan pendidikan dan pelatihan dapat berpengaruh langsung terhadap peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang akhirnya nanti juga akan dapat meningkatkan pendapatan sumber daya manusia itu sendiri. (Bahri, 2012)

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam peningkatan mutu pendidikan. Karena pendidikan merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, dan upaya menentukan masa depan yang lebih baik. Dalam peningkatan mutu pendidikan diperoleh melalui dua strategi, yaitu peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi akademis untuk memberi dasar minimal dalam perjalanan yang harus ditempuh mencapai mutu

pendidikan yang dipersyaratkan oleh tuntutan zaman, dan peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada keterampilan hidup yang esensial yang dicakupi oleh pendidikan yang berlandasan luas, nyata dan bermakna.(Sagala, 2004 : 39) Untuk itu keberhasilan sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan bermutu banyak ditentukan oleh kemampuan sekolah dalam melakukan terobosan untuk pemberdayaan seluruh warga sekolah dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan pendidikan.

Mutu pendidikan tinggi yang diharapkan sekolah pula melalui proses pendidikan yang optimal, yaitu merubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input sedangkan sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan proses yang dimaksud meliputi proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, proses belajar mengajar, serta proses monitoring dan evaluasi. Adapun mutu pendidikan adalah penilaian suatu output yang memenuhi kriteria standar atau rujukan tertentu, rumusan mutu pendidikan bersifat dinamis dan dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang. Kesepakatan tentang konsep mutu dikembalikan pada rumusan acuan atau rujukan yang ada seperti yang diungkapkan Syaiful Sagala bahwa konsep mutu adalah kebijakan pendidikan, proses mengajar, kurikulum, sarana prasarana, fasilitas pembelajaran dan tenaga kependidikan sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan (Sagala, 2004: 169)

Pada konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, luaran dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi. Pertama, kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, laborant, staf tata usaha, dan siswa. Kedua, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah, dan lain-lain. Ketiga, memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, deskripsi kerja, dan struktur organisasi. Keempat, mutu masukan yang bersifat harapan

dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita (Sagala, 2004)

Suatu bangsa yang memprioritaskan pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusianya, ia akan menghasilkan manusia yang unggul sebagai tenaga kerja yang berkualitas kompetitif dan siap memasuki pasar kerja global. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pula yang ditempuh Taiwan, Irlandia, dan China serta negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Dikutip dari Kompas 2020 dalam Rasyid (2020) Taiwan berupaya menghapus buta sains dan membebaskan ujian masuk universitas, maka timbulah berbagai kritikan, karena dalam dunia pendidikan yang kini berkembang pesat justru harus terkur kemampuan manusianya. Dengan demikian, maka prioritas pengembangan sumber daya manusia mestinya menjadi pilihan utama dalam pembangunan suatu bangsa, yang dimulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan perguruan tinggi yang tercermin dalam anggaran pendidikan. Negara seharusnya bangsa yang memprioritaskan pendidikan sebagai pembangunan sumber daya manusianya (SDM), menganggap bahwa melalui pendidikan akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonominya. Dikutip dalam laman HDI *Human development indices* Indonesia menduduki ranking 107 tergolong dalam *High human development* sementara Jepang berada pada ranking 19 tergolong dalam *Very high human development*. (Nations, 2022) Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Rika bahwa negara Jepang menggunakan jasa sumber daya manusia dari Indonesia pada guru disekolah salah satunya adalah Rika ini, beliau merupakan lulusan dari Universitas Lampung Indonesia para Program Studi Pendidikan Ekonomi dan Kebidanan yang diberdayakan di rumah sakit, begitu juga pada negara Thailand yang masyarakatnya banyak yang mendapatkan pendidikan di Indonesia dan lulusan luarnya di butuhkan di negara Thailand itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih tergolong berkualitas sehingga pada mutu luaran masih diperlukan bagi negara Jepang dan juga Thailand begitupun sebaliknya. Untuk itu peneliti tertarik dan perlu melakukan kajian mendalam terkait Analisis Investasi

Pendidikan Pada Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Gobal.

BAB 2

HUMAN CAPITAL

A. Theory of *human capital*

Gunawan A. Wardhana sebagaimana yang dikutip oleh A.S. Munandar dalam Harbison menyatakan bahwa sumber daya manusia mencakup semua energi, keterampilan, bakat, dan pengetahuan manusia yang dipergunakan secara potensial dapat atau harus dipergunakan untuk tujuan produksi dan jasa-jasa yang bermanfaat. (Munandar, 1981, hal. 9)

Webster berpendapat, yang dimaksud sumber daya manusia ialah "alat atau kekayaan yang tersedia (*available means*), kemampuan atau bahan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan". Definisi dari dua kamus di atas diperkuat oleh pernyataan Deacon dan Malock dalam Gross Crandall dan Knol yang mendefinisikan sumber daya manusia sebagai "alat atau bahan yang tersedia dan diketahui potensinya untuk memenuhi keinginan". (Gunaharja, 1993, hal. 4) Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang sumber daya manusia (SDM) diartikan sebagai "potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi." (Depdikbud, 1999, hal. 973)

Theodore W. Schultz was the inventor of basic theory or concept of human capital (human capital concept). In his journal, entitled *Investment in Human Capital*, Schultz argues, the concept of human capital in essence, assumes that humans are a form of capital or capital as well as other forms of capital, such as machinery, technology, land, money, and material [4]. Human beings as human capital is reflected in various forms such as knowledge, ideas (ideas), creativity, skill, and labor productivity. The concept of human capital by Becker (1975) apply economic logic to examine individual investment decisions regarding education and job training, career options and other characteristics related to work. This means that investing in education is done in order to meet expectations of the work to be done in the future.

Similarly, in the hope of income received will be greater than the cost of issuance of investing education. The basic assumption of human capital theory is that a person can increase their incomes by improving education. Each additional year of school means, on the one hand, improve the work ability and the level of a person's income, but, on the other hand, delaying receipt of income during the study follow. Improving the quality of human capital cannot be done in a short time, but it takes a long time. Human capital investment will be actually the same as investing in other production factors. In this case also calculated the rate of return (benefit) from such investments. When someone would make an investment, it must make a cost benefit analysis (cost benefit analysis). Costs are direct costs incurred to attend school plus indirect costs or opportunity costs (opportunity cost). Opportunity cost here is the income received by someone if he chooses to work and do not attend school. While the benefits of educational investment will be revenue to be received in the future after the school year is finished. It is expected from this investment income (benefits) gained far outweigh the costs (*Human Capital Investment and Local Development in Digitalization Era - Dimensions, t.t.*)

B. Human Capital Investmen

Investasi pendidikan adalah adalah pemanfaatan sumber daya manusia yang terdidik sebagai investasi yang berharga, langka untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutanmenunjang pertumbuhan ekonomi (Nurulfalik, 2004, hal. 12). Sumber daya manusia Indonesia masih perlu dikembangkan guna mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Dan pemerintah sudah konsen pada pendidikan sebab pendidikan sebagai investasi jangka panjang, dibuktikan oleh prioritas anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBD. Keputusan ini merupakan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang.

Menurut Nurkolis (2005), sedikitnya terdapat tiga alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang :

1. Pendidikan Sebagai Alat Perkembangan Ekonomi Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi ini merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi secara ekonomis.

Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup. Inilah sebenarnya arah Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), pendidikan life skill dan broad based education yang dikembangkan di Indonesia akhir-akhir ini (Tampubolon, 2005).

Manfaat non-moneter dari pendidikan adalah diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan. Manfaat moneter adalah manfaat ekonomis yaitu berupa tambahan pendapatan seseorang setelah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan di bawahnya (McMahon dan Geske, 1982; 121). Sumber manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Hal ini

dikarenakan telah dikuasainya keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sumber daya manusianya sehingga pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional.

2. Nilai Balikan Pendidikan Investasi pendidikan memberikan nilai balik (rate of return) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja. Di negara-negara sedang berkembang umumnya menunjukkan nilai balik investasi pendidikan relatif lebih tinggi dari pada investasi modal fisik yaitu 20% berbanding 15%. Keadaan ini dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah tenaga kerja terdidik yang terampil dan ahli di negara berkembang relatif lebih terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan sehingga tingkat upah lebih tinggi dan akan menyebabkan nilai balik terhadap pendidikan juga tinggi (Suryadi, 1999; 247).

Pilihan investasi pendidikan juga harus mempertimbangkan tingkatan pendidikan. Di Asia nilai balik sosial pendidikan dasar rata-rata sebesar 27%, pendidikan menengah 15% dan pendidikan tinggi 13%. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka manfaat sosialnya semakin kecil. Jelas sekali bahwa pendidikan dasar memberikan manfaat sosial yang paling besar diantara tingkat pendidikan lainnya. Oleh karena itu maka struktur alokasi pembiayaan pendidikan harus direformasi. Dirjen Dikti, Satrio Sumantri Brojonegoro suatu ketika mengemukakan bahwa alokasi dana untuk perguruan tinggi negeri 25 kali lipat dari pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa biaya pendidikan yang lebih banyak dialokasikan pada pendidikan tinggi justru terjadi inefisiensi karena hanya menguntungkan individu dan kurang memberikan manfaat kepada masyarakat. Reformasi alokasi biaya pendidikan ini penting dilakukan mengingat beberapa

kajian menunjukkan bahwa mayoritas yang menikmati pendidikan di PTN adalah berasal dari masyarakat mampu. Maka model pembiayaan pendidikan selain didasarkan pada jenjang pendidikan juga didasarkan pada kekuatan ekonomi peserta didik. Artinya peserta didik di PTN yang berasal dari keluarga kaya dikenakan biaya pendidikan yang lebih mahal dari pada yang berasal dari keluarga miskin. Model ini sesuai dengan kriteria equity dalam pembiayaan pendidikan seperti yang digariskan UNESCO. Itulah sebabnya Profesor Kinoshita menyarankan bahwa yang diperlukan di Indonesia adalah pendidikan dasar bukan pendidikan yang canggih. Proses pendidikan pada pendidikan dasar setidaknya bertumpu pada empat pilar yaitu; Learning to know, Learning to do, Learning to be dan Learning live together yang dapat dicapai melalui delapan kompetensi dasar yaitu membaca, menulis, mendengar, menutur, menghitung, meneliti, menghafal, dan menghayal. Anggaran pendidikan nasional harusnya diprioritaskan untuk mengentaskan pendidikan dasar 9 tahun dan bila perlu diperluas menjadi 12 tahun. Selain itu pendidikan dasar seharusnya benar-benar dibebaskan dari segala beban biaya. Apabila semua anak usia pendidikan dasar sudah terlayani mendapatkan pendidikan tanpa dipungut biaya, barulah anggaran pendidikan dialokasikan untuk pendidikan tingkat selanjutnya.

3. Fungsi Non Ekonomis Dalam Investasi Pendidikan Investasi dalam pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis, yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan.
 - a. Fungsi sosial-kemanusiaan; merujuk pada kontribusi pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat sosial yang berbeda. Misalnya pada tingkat individual pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan dirinya secara psikologis, sosial, fisik dan membantu siswa mengembangkan potensinya semaksimal mungkin (Cheng, 1996; 7).

- b. Fungsi politis; merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Misalnya, pendidikan membentuk siswa untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warganegara yang benar dan bertanggung jawab. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mengerti hak dan kewajibannya sehingga wawasan dan perilakunya semakin demokratis. Selain itu orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara lebih baik dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan.
- c. Fungsi budaya; merujuk pada sumbangan pendidikan pada peralihan dan perkembangan budaya pada tingkatan sosial yang berbeda. Misalnya, pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan kreativitasnya, kesadaran estetis serta untuk bersosialisasi dengan norma-norma, nilai-nilai dan keyakinan sosial yang baik. Orang yang berpendidikan diharapkan lebih mampu menghargai atau menghormati perbedaan dan pluralitas budaya sehingga memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap keaneka ragaman budaya. Dengan demikian semakin banyak orang yang berpendidikan diharapkan akan lebih mudah terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya akan terjadi integrasi budaya nasional atau regional.
- d. Fungsi kependidikan; merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan dan pemeliharaan pendidikan pada tingkat sosial yang berbeda. Misalnya, pendidikan membantu siswa belajar cara belajar dan membantu guru cara mengajar. Orang yang berpendidikan diharapkan memiliki kesadaran untuk belajar sepanjang hayat (life long learning), selalu merasa ketinggalan informasi, ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga terus terdorong untuk maju dan terus belajar. Di kalangan masyarakat luas juga berlaku pendapat umum bahwa semakin berpendidikan maka makin baik status sosial

seseorang dan penghormatan masyarakat terhadap orang yang berpendidikan lebih baik dari pada yang kurang berpendidikan. Orang yang berpendidikan diharapkan bisa menggunakan pemikiran-pemikirannya yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Orang yang berpendidikan diharapkan tidak memiliki kecenderungan orientasi materi / uang apalagi untuk memperkaya diri sendiri (Nurkolis, 2005; 3).

Human Capital Investmen Challenge for company is get and utilise source power which precious , rare and nothing _ comparison for get superiority competitive which sustainable compared competitors. Source power this including assets, capabilities , processes organization , information , and knowledge which allow company for develop and implement a strategy that increase performance company . Various source power this which could classified in three categories: Source Physical Capital Power, Source Human Capital Resources and Source Organizational Capital Power. In article this we focus on human capital, defined as knowledge, Information, ideas, skills , and health individuals. Human capital has Becomes source success company which important because environment business has Becomes the more competitive. Human Capital is the company's most important resource, given that such resources are valuable, unique and difficult to imitate, due to specificities such as knowledge, experience, skills, abilities, and emotional intelligence. In addition, his interest is evident in managing and directing all other resources, giving the company a competitive advantage, including innovating and modernizing the company's organizational processes or strengthening the overall success of the organization. Various authors view HC as including employees who possess individual and collective knowledge, skills, abilities, attitudes, potential, behaviors and emotions. It also includes the knowledge, abilities and expertise of personnel. HC is observed from social and economic aspects for the company. HC can be summarized as a result of investment and accumulation of education, skills,

abilities, motivation, energy and cultural development to create a group of people who are engaged in public reproduction, promote economic growth and have an effect on the magnitude of income for the owner of the company (35). Human Capital is a phenomenon that reconciles the current requirements for improving performance, competitiveness and sustainability with the requirements for a high level of expertise in the field of information technology of employees working in ebusiness (36). Many have investigated the relationship between human capital expenditures investment (outcomes of employee education and training) and company performance (financial indicators)(35). Investing in human capital is a multi- stage process that starts early in life. As a result, investment in human capital is an intergenerational family problem . We develop a human capital-based family theory that incorporates the dynamic nature of investments in children, intergenerational transfers , and loan constraints faced by parents and college-age youth. Our theory explains the fact that later investments build on previous investments, that early childhood investments are made by young parents early in their careers, and that desired loans may differ substantially over the life cycle . Becker argues, that human resources are not only resources but also capital that produces a compensatory return on all costs invested, developing itself in quantity and quality over time during human investment. In the labor market, human resources represent the value of a worker so that it determines the ability of the worker to produce goods and services. Human capital investment is primarily assumed to be adding an extra year of schooling to earn a certain additional unit in future earnings. Forgotten income due to additional years of study in school, tuition fees, fees for books and other equipment, transportation and other relevant costs amount to the total investment that must be borne by future earnings. Furthermore, Becker considers the following activities as human capital investment : 1) Job training . Job training provides essential skills demanded by the job. Generic training provides basic skills that are generally applicable in almost all occupations. Company-

specific training provides the distinctive skills needed to complete certain jobs that may not be available elsewhere thereby building stronger bonds between employers and trainees; 2) School . School is an attempt to acquire cognitive knowledge in one or more majors; 3) Other efforts in seeking knowledge . In addition to schools and training, human investment can include migration and accessing economic information which can be geographically difficult and expensive; 4) Self development . Companies usually invest in maintaining the physical and mental well-being of their employees by providing medical services, nutrition, protection from hazardous work and creating positive work policies. Investments in Education, Improvements in obtaining qualifications, development of the education and science systems—investments in human resources—are very important for our society if we are to solve current problems and increase the national budget. Unless we invest in human resources, especially our young generation, we can be threatened by the lack of knowledge and skills in the future to compensate for the more advanced problems that are to come. While investing in human resources can be expensive at first, it can prove to be a huge benefit in the future, so we need to make a decision - invest or fall behind. In the literature , there are many studies and research results described, showing the importance of HC and investment in increasing its value (increasing the individual component), especially through training in information technology (IT) for companies in the field of e-business. The framework (technology-organization-environment) is applied here, using three aspects that influence the implementation of technological innovations (e-business) identified. The technology context represents the technology currently used in the company and the relevant technical skills of the available employees. Organizational context is characterized by a company's internal specifics, such as its size. The environmental context represents the external environment in which the firm operates, thus its industry, competitors, and business partners. In this case, human resources are first included

in the elements of technical skills that employees need.(Eliza dkk., 2019)

BAB 3

QUALITY OF EDUCATION

A. Definisi Mutu Pendidikan

Definisi mutu memiliki konotasi yang bermacam-macam tergantung orang yang memakainya. Mutu berasal dari bahasa Latin, *qualis*, yang artinya *what kind of*. Mutu menurut Deming ialah kesesuaian dengan yang diisyaratkan. Mutu menurut West Burnham ialah ukuran relatif suatu produk atau jasa sesuai dengan standar mutu desain. Mutu desain meliputi spesifikasi produk dan mutu penyesuaian, yaitu seberapa jauh suatu produk telah memenuhi persyaratan atau spesifikasi mutu yang ditetapkan. Mutu menurut Peter & Ausin ialah nafsu dan kebanggaan. Perusahaan raksasa IBM mendefinisikan mutu ialah kepuasan pelanggan. Perusahaan raksasa lainnya, Ford Motor mendefinisikan mutu ialah memuaskan pelanggan sepuas-puasnya. Sedangkan Sallis berpendapat bahwa mutu sulit didefinisikan, dan suatu konsep yang mudah lepas serta sulit dipegang. Pfeffer & Coote menyatakan bahwa mutu adalah konsep yang licin karena memiliki berbagai arti yang berbede-beda. Mutu menurut Sallis adalah konsep yang absolut dan relatif. (Usman, 2009, hal. 511).

Mutu juga merupakan gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan oleh pelanggan (UPI, 2009, hal. 295). Mutu yang absolut ialah mutu yang idealismenya tinggi dan harus dipenuhi, berstandar tinggi, dengan sifat produk bergengsi tinggi, biasanya mahal, sangat mewah, dan jarang dimiliki orang. Misalnya, mobil mewah, rumah mewah, perhiasan mewah, dan interior president room di hotel bintang lima. Mutu dengan konsep absolut berarti harus *high quality* atau *top quality*. Mutu sendiri dapat didefinisikan sebagai tingkat keunggulan.

Mutu yang relatif menurut Sallis bukanlah sebuah akhir, namun sebagai sebuah alat dimana produk atau jasa dinilai, yaitu apakah telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Mutu sebagai konsep relatif memiliki dua aspek, yaitu prosedural dan transformasional. (UPI, 2009, hal. 511) Aspek prosedural ialah mutu jasa atau produk yang dihasilkan sudah sesuai dengan spesifikasi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Jika produk itu bersifat masal maka semuanya akan seragam mutunya. Sedangkan transformasional ialah ukuran mutu lebih mengarah pada peningkatan mutu dan perubahan organisasi. Aspek ini meliputi (UPI, 2009, hal. 511) (1) Pelayanan pria kepada pelanggan, tanggung jawab sosial yang tinggi, kepuasan pelanggan dan perawatan, (2) Pelanggan dinomor satukan, didengar, dan dipuaskan, (3) Dilingkungan pendidikan, budaya transformasional adalah fungsi dari motivasi yang dimiliki pendidik dan pemimpin dengan peserta didik sebagai pusat perhatiannya.

Dapat difahami berarti mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi akademik maupun non akademik dilandasi oleh kompetensi personal, dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup (life skill) (Sudrajat, 2005, hal. 17)

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, luaran dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi antara lain (denim, 2006, hal. 53);

1. kondisi baik atau tidaknya masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata usaha, dan siswa.
2. memenuhi atau tidaknya kriteria masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah, dan lain-lain.
3. memenuhi atau tidaknya kriteria masukan yang berupa perangkat lunak, seperti peraturan, struktur organisasi, deskripsi kerja, dan struktur organisasi.
4. mutu masukan yang bersifat harapan dan kebutuhan, seperti visi, motivasi, ketekunan, dan cita-cita.

Adapun mutu proses mengandung makna bahwa kemampuan sumber daya sekolah mentransformasikan multijenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu bagi peserta didik. dan dalam mutu proses ini terlibat berbagai input seperti bahan ajar, metodologi, sarana dan prasarana sekolah, dukungan administrasi, manajemen, sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Dengan mensinergikan semua komponen tadi guna mendukung proses pembelajaran.

Begitu pula mutu luaran adalah mutu hasil dengan melahirkan keunggulan akademik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. (denim, 2006, hal. 53-54)

Dalam dunia pendidikan, standar ini menurut Depdiknas dapat dirumuskan melalui hasil belajar mata pelajaran skolastik yang dapat diukur secara kuantitatif, dan pengamatan yang bersifat kualitatif, khususnya untuk bidang-bidang pendidikan sosial. Rumusan mutu pendidikan bersifat dinamis dan dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang.

B. Manfaat Mutu bagi Pendidikan

Mutu bermanfaat bagi dunia pendidikan karena: (1)Meningkatkan pertanggung jawaban (akuntabilitas) sekolah kepada masyarakat dan atau pemerintah yang telah memberikan semua biaya kepada sekolah, (2)Menjamin mutu lulusannya, (3)Bekerja lebih profesional, (4)Meningkatkan persaingan yang sehat.

Mutu pendidikan harus diupayakan untuk mencapai kemajuan yang dilandasi oleh suatu perubahan terencana. Peningkatan mutu pendidikan diperoleh melalui dua strategi, yaitu peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi akademis untuk memberi dasar minimal dalam perjalanan yang harus ditempuh mencapai mutu pendidikan yang dipersyaratkan oleh tuntutan zaman, dan peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada keterampilan hidup yang esensial yang dicakupi oleh pendidikan yang berlandasan luas, nyata dan bermakna.

Berkaitan dengan strategi yang akan ditempuh, peningkatan mutu pendidikan sangat terkait dengan relevansi pendidikan dan penilaian berdasarkan kondisi aktual mutu pendidikan tersebut. (sagala, 2009, hal. 170)

Mutu pendidikan tidak saja ditentukan oleh sekolah sebagai lembaga pengajaran, tetapi juga disesuaikan dengan apa yang menjadi pandangan dan harapan masyarakat yang cenderung selalu berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Bertitik tolak pada kecenderungan ini penilaian masyarakat tentang mutu lulusan sekolah pun terus menerus berkembang. Karena itu sekolah harus terus menerus meningkatkan mutu lulusannya dengan menyesuaikannya dengan perkembangan tuntutan masyarakat menuju pada mutu pendidikan yang dilandasi tolak ukur norma ideal.

Deskripsi manusia seutuhnya menghendaki agar pendidikan yang diberikan meliputi berbagai kemampuan yang relevan dengan kebutuhan perkembangan manusia seutuhnya, yang dilandasi oleh dorongan untuk bertahan dalam hidup bersama dengan orang lain, maupun dorongan untuk berkembang. Hal ini berarti bahwa kompetensi yang dimiliki oleh setiap individu dalam konteks kehidupan harus selalu dapat diadaptasikan pada perubahan cepat yang terus menerus. Strategi peningkatan mutu pendidikan yang menuju pada pengembangan keterampilan yang relevan, nyata dan bermakna itulah yang diperlukan dalam kehidupan dimasyarakat. Keterampilan hidup bukan saja kompetensi dalam mengelola dirinya untuk tumbuh kembang, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Namun juga kompetensi menguasai berbagai pengetahuan, keterampilan dalam berbagai situasi spesifik dirumah, ditempat kerja, dimasyarakat, dan bagaimana ia mengadakan relasi dengan orang lain.

Two of our indicators of quality of education were chosen due to their availability in historical education reports during the time period when this cohort began schooling (1920–1940): school year length and student–teacher ratio. Participants began schooling in the mid-1930s, on average, with the entire cohort turning school age before 1950. Data were gathered from three

reports ranging from 1926 to 1945 from the Commissioner of Education in Puerto Rico (Government of Puerto Rico Department of Education, 1928, 1935, 1947) and supplemented by data from the U.S. Census Bureau for 1935 (school attendance) and 1940 (literacy). There is no one source in Puerto Rico with a complete collection of the Commissioner of Education reports from the 1920s through the 1940s, but we found that many were available from the University of Puerto Rico library system. Reports were chosen in order to have at least one report that included at least some information on indicators of quality from each decade during which the majority of participants attended school. A third of the sample was born before 1928, another third from 1928 to 1935, and the last third after 1935. Thus, we were able to identify three education reports with information relevant to education quality that also provided information separately for each municipality, corresponding to fiscal years of 1926–1927, 1933–1934, and 1945–1946. There was inconsistency in the availability of data across the years 1920–1940, with no one year containing both length of school year and student–teacher ratio stratified by municipality. Therefore, we used information on either school year length (1926–1927; 1933–1934) or student–teacher ratio (1945–1946). Most of the Commissioner of Education reports during this time period either did not provide data by municipality or did not include measures (Barbakk., 2021).

BAB 4

INVESTASI PENDIDIKAN PADA SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN GLOBAL

Terdapat korelasi bpositif antara variabel investasi dan sumber daya manusia dengan mutu pendidikan. Semakin tinggi variabel investasi pendidikan maka akan semakin tinggi mutu pendidikan, juga semakin tinggi sumber daya manusia maka semakin tinggi mutu pendidikannya. Perlu diketahui pula bahwa pendidikan di Inonesia terbagi menjadi tiga, yaitu pendidikan Formal, Non Formal, Informal, maka makna pendidikan disini bisa di artikan pada ketiga jenis pendidikan tersebut.

A. Prioritas Pendidikan Sebagai Investasi Jangka Panjang

Menurut Nurkolis (2005), sedikitnya terdapat tiga alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang :

1. Pendidikan Sebagai Alat Perkembangan Ekonomi

Pada tataran global konsep pendidikan sebagai investasi (*edication as investment*) diyakini dan terus berkembang, dan pada praktis manajemen pendidikan modern fungsi pendidikan merupakan fungsi teknis-ekonomis pada individual maupun global. Fungsi ini merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Karena pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi secara ekonomis.

Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas tersebut dikarenakan memiliki keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan.

Disamping itu juga pendidikan life skill dan broad based education yang dikembangkan.

Di Indonesia pendidikan merupakan investasi modal manusia (*human capital investment*) dan menjadi *leading sektor* serta merupakan sektor utama pemerintahnya, ini terbukti pada anggaran negara sektor pendidikan memiliki anggaran 20% yang diaplikasikan pada bantuan operasional sekolah dari sekolah dasar sampai dengan pendidikan tinggi, gaji dan tunjangan guru dan lain lain, hal ini menunjukkan komitmen pemerintahnya membangun SDM melalui pendidikan. Disamping itu pemerintah terus menaikkan upah minimum rakyat (UMR) tiap tahunnya, dan begitu juga pada gaji pegawai negeri sipil (PNS), sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makro. (PJ, 2023)

Sistem pendidikan di Jepang merupakan salah satu contoh pola pendidikan yang berhasil menerapkan norma-norma yang luar biasa. Jepang merupakan salah satu negara yang unggul dalam sistem pendidikan hal ini juga di buktikan oleh survey Best Country Report yang diadakan oleh US News and World Report. Dalam survey tersebut Jepang menduduki peringkat ke 7 sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia.

Sistem di negara ini berkembang melalui beberapa proses. Pola yang pertama pada mulanya mengikuti pola yang diterapkan oleh China. Setelah itu pada era missionaris program pendidikan di Jepang mulai berubah dan disesuaikan dengan perkembangan yang dibawa oleh negara barat. Setelah itu masuk ke era Edo dimana literasi mulai meningkat juga pada ideology dan kedisiplinan. (Ican, 2023)

Untuk itu Jepang diakui sebagai salah satu negara maju dengan kekuatan perekonomian terbesar di dunia. Menariknya, pencapaian tersebut diperoleh karena keberhasilan sistem pendidikan di Jepang mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Orang Jepang memang dikenal sebagai pekerja keras, disiplin tinggi, tepat waktu dan memiliki etos

kerja. Tingginya mutu SDM di Jepang tidak lepas dari kesuksesan bangsa ini dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas pendidikan. Suksesnya pelaksanaan pendidikan di Jepang dapat kita lihat dari skor *Program for International Student Assessment* (PISA) Jepang yang selalu konsisten di level tinggi. Pada tahun 2015, dari 72 negara yang mengikuti program ini, Jepang berhasil menduduki urutan kedua dalam sains dan memperoleh posisi kelima dalam pelajaran matematika. Pada tahun 2018, peringkat Jepang memang mengalami penurunan yakni peringkat enam untuk matematika dan urutan kelima untuk sains. Meski demikian, skor Jepang dinilai masih tinggi. (Ican, 2023)

Dengan begitu sistem pendidikan di atur oleh Kementerian Pendidikan Jepang. Dalam sistem pendidikan Jepang kini, hanya melakukan apa yang disetujui kementerian dan menghindari sistem lain, sebab hal ini merupakan cara terbaik untuk memasuki universitas. Artinya, segala sistem edukasi yang tak disetujui oleh kementerian tidak dapat diselenggarakan, seperti aktivitas relawan dan komunitas, home education, dan berbagai cara ajar lainnya. Hal ini juga merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga keefektifan pendidikan guna meningkatkan sumberdaya manusia agar lebih terampil dan terarah menjadi manusia yang profesional. (RK, 2023) Pendidikan di Jepang juga dibagi menjadi dua yaitu (Novi Handayani 2017):

- a. Sekolah negeri yang biasanya disebut koritsu gakko.
Sekolah negeri itu dikepalai atau diselenggarakan oleh pemerintah kota atau yang disebut prefektur. Tetapi ada beberapa juga sekolah yang dikelola oleh prefektur dan pemerintah pusat. Di sekolah negeri biasanya siswa mulai masuk mulai dari hari senin hingga hari jumat
- b. Sekolah Swasta swasta disebut juga dengan shiritsu gakko
Sekolah ini diselenggarakan oleh badan hukum, disekolah ini pembelajaran dilaksanakan selama 1 minggu fulmdari senin sampai sabtu.

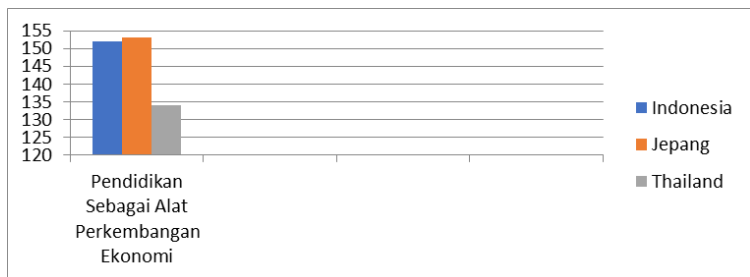
Di Jepang seseorang yang berpendidikan doktor berpenghasilan rata-rata per tahun sebesar 55 juta dollar, master 40 juta dollar, dan sarjana 33 juta dollar. Sementara itu lulusan pendidikan lanjutan hanya berpenghasilan rata-rata 19 juta dollar per tahun. Pada tahun yang sama di Indonesia, pendapatan per tahun lulusan universitas 3,5 juta rupiah, akademi 3 juta rupiah, SLTA 1,9 juta rupiah, dan SD/SMP hanya 1,1 juta rupiah. Para penganut teori human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun non-moneter.

Di Thailand pemerintahnya melalui terus melakukan perkembangan kualitas sumber daya manusianya, melalui pendidikan pemerintahnya telah mengalokasikan 2,4 triliun Bath atau setara dengan 800 triliun rupiah. Alokasi anggaran ini merupakan alokasi anggaran terbesar pada Kementerian Pendidikan yaitu sekitar 19.18 % dari seluruh total anggaran belanja pemerintah Thailand yang dialokasikan dengan membantu rakyatnya untuk sekolah gratis 12 tahun dari sejak *Prathom* 6 tahun *Mattayom* 6. Pendidikan yang dimiliki menjadi modal masyarakatnya dalam mendapatkan gaji dengan bekerja berdasarkan kualifikasi akademik, seperti diterima di sekolah dengan kategori Asisten Guru, dan terus berkembang menjadi Guru, Guru Ahli, Guru dengan keahlian khusus, Guru Spesialis, dan Spesialis Senior dengan kemudian Kementerian Pendidikan telah menetapkan skala penggajian dari 16,190 bath sampai 18,690 bath. Selain gaji, guru juga menerima tunjangan yang besarnya tergantung dari klasifikasi guru. (Dr. Ir. Yunardi, 2020)

Sehingga manfaat non-moneter dari pendidikan adalah diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan. Manfaat moneter adalah manfaat ekonomis yaitu berupa tambahan pendapatan seseorang setelah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan

dengan pendapatan lulusan pendidikan di bawahnya.. Sumber manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah dikuasainya keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sumber daya manusianya sehingga pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional.

Data yang didapatkan dari kuesioner dapat disimpulkan bahwa dari tiga negara yaitu Indonesia, Jepang dan Thailand bahwa pendidikan adalah sebuah alat perkembangan ekonomi, sebab pendidikan berkontribusi penting membentuk keterampilan dan kemampuan, serta pengetahuan seseorang yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi secara ekonomis, untuk itu dapat digambarkan dalam grafik berikut ini:



Gambar. 2. Grafik Pendidikan Sebagai Alat Perkembangan Ekonomi

2. Nilai Balik Pendidikan

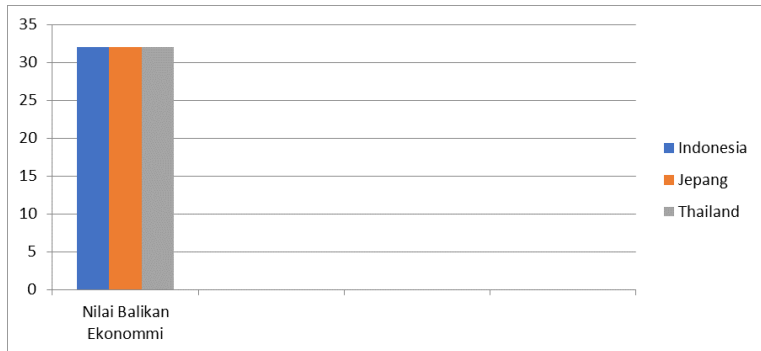
Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Nilai balik pendidikan adalah perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan

memasuki dunia kerja. Di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia, Jepang dan Thailand umumnya menunjukkan nilai balik investasi pendidikan relatif lebih tinggi dari pada investasi modal fisik yaitu 20% berbanding 15%. Keadaan ini dapat dijelaskan bahwa dengan jumlah tenaga kerja terdidik yang terampil dan ahli di negara berkembang relatif lebih terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan, sehingga tingkat upah lebih tinggi dan akan menyebabkan nilai balik terhadap pendidikan juga tinggi (Suryadi, 1999; 247).

Pilihan investasi pendidikan juga harus mempertimbangkan tingkatan pendidikan. Di Asia nilai balik sosial pendidikan dasar rata-rata sebesar 13%, pendidikan menengah 15% dan pendidikan tinggi 27%. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka manfaat sosialnya semakin besar.

Pembiayaan sekolah negeri di thailand pun relatif sama dengan Indonesia seluruhnya berasal dari Pemerintah. Sekolah-sekolah mengusulkan kebutuhan pembiayaan kepada Dinas Pendidikan Wilayah, yang selanjutnya setelah dikompilasi oleh Dinas akan diteruskan Kantor Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar atau Kantor Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah tergantung jenjang sekolahnya. Setelah Kantor Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah ini melakukan kompilasi dari seluruh wilayah, usulan diteruskan ke Kementerian Pendidikan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.2. Selanjutnya usulan ini disampaikan pada sidang kabinet. Persetujuan besaran usulan anggaran dari setiap kementerian baru akan sah setelah mendapat persetujuan dari parlemen Thailand. Dalam hal ini proses pengusulan anggaran pada hakikatnya sama persis seperti di Indonesia. Dalam pelaksanaan pendanaan, pembiayaan seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah negeri dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah. (PJ, 2023), (SS, 2023) 2023), (RK, 2023).

Dengan demikian maka nilai balik pendidikan pada tiga negara yaitu Indonesia, Jepang, dan Thailand dapat disimpulkan dari data kuisioner menyatakan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan seimbang dengan pendapatan yang diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja



Gambar. 3. Nilai Balikan Pendidikan

3. Fungsi Non Ekonomis

Dalam Investasi Pendidikan Investasi dalam pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis, yaitu fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya, dan fungsi kependidikan.

a. Fungsi sosial-kemanusiaan;

Fungsi ini merujuk pada kontribusi pendidikan terhadap perkembangan manusia dan hubungan sosial pada berbagai tingkat sosial yang berbeda. Yaitu di Indonesia pada tingkat individual pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan dirinya secara psikologis, sosial, fisik dan membantu siswa mengembangkan potensinya semaksimal mungkin (Cheng, 1996; 7).

Kepribadian yang lebih matang dalam bersosial antar kemanusiaan, memiliki daya empathy yang tinggi, sehingga membentuk individu yang berbudi luhur

sebagaimana indentitas warga negara indonesia yang tertuang dalam undang-undang Republik Indonesia, bahkan di Indonesia penilaian jiwa sosial manusia masuk dalam domain kriteria penilaian akademik pada semua jenjang pendidikan yaitu domain nilai Afektif. (PJ, 2023)

Di Jepang kompetensi sosial siswa sudah di bangun dari sejak dini, sehingga tidak terjadi diskriminasi sosial dibidang pendidikan, hal ini membongkar struktur diplomatisme mereka tentang pemberantasan bullying. Dan juga etika dan Kedisiplinan siswa sudah berada pada usia tiga tahun, yaitu awal anak-anak diberikan pemahaman yang penting berkaitan dengan tata cara berperilaku sehari-hari serta nilai sopan santun. faktor etikanya yang baik, maka nanti akan mengikuti penerapan IPTEK (Ilmu pengetahuan dan teknologi) secara baik pula. (Dedi Presli Halawa, 2023), (RK, 2023)

Pada aspek kedisiplinan sistem pendidikan di Jepang melaksanakan kegiatan pembelajaran mulai pukul 8.00-15.00 waktu setempat. Siswa yang datang terlambat ke sekolah diminta untuk membuat surat perjanjian. Isinya adalah pernyataan untuk tidak mengulangi keterlambatannya. (Montanesa, 2021) hal ini dilakukan guna melatih siswa melalui pendidikan untuk disiplin. Pemerintah Jepang juga memfokuskan pendidikannya pada pendidikan karakter sejak dini sebagaimana penjelasan di atas. Dalam kebijakan pendidikan di Jepang, nilai-nilai kebudayaan Jepang dimasukkan bersamaan dengan nilai-nilai modernisasi. Pemerintah Jepang memberikan akses bagi masyarakat untuk tetap mengelola nilai-nilai moral dalam kehidupan yang telah diajarkan oleh leluhur bangsa Jepang (Widisuseno, 2018). Kebudayaan Jepang yang bersifat tradisional menjadi dasar bagi pendidikan karakter di Jepang. Disamping itu Bangsa Jepang memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pendidikan karakter. Karenanya, pendidikan di Jepang memiliki keunggulan

dalam membentuk karakter-karakter yang berbeda dengan bangsa lain di dunia (Aniswita, 2021)

Di Thailand ketentuan dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1999, Kantor Dewan Pendidikan negara Thailand bertanggung jawab untuk mengusulkan standar pendidikan nasional. susunan standar yang dirumuskan oleh Kantor tersebut melalui kerjasama dengan kantor-kantor yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dasar, kejuruan, dan pendidikan tinggi serta Kantor Standar Pendidikan Nasional dan Penjaminan Mutu (*Office for National Education Standards and Quality Assessment, ONESQA*). Lembaga memberikan pendidikan di semua tingkatan diharapkan mematuhi standar pendidikan nasional, yang terdiri kategori Memenuhi karakteristik rakyat Thailand, (SS, 2023) baik sebagai warga negara maupun sebagai anggota masyarakat dunia, terdiri lima indikator:

- 1) Kesehatan fisik dan mental yang baik, 2
- 2) Pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalani hidup yang bermakna dan pembangunan sosial ,
- 3) Keterampilan dalam belajar dan penyesuaian diri ;
- 4) Keterampilan sosial , dan
- 5) Kejujuran, pola fikir, dan kesadaran sebagai warga negara thailand dan warga negara dunia.

Bahkan tertuang dalam kurikulum bahwa Inti Pendidikan Dasar bertujuan untuk mengembangkan siswa secara maksimal dalam hal moral, pemahaman, kenyamanan, dan potensi untuk studi lanjut dan menjalani kehidupan. Sasaran-sasaran berikut diharapkan dicapai oleh anak didik setelah menyelesaikan pendidikan:

- 1) Moralitas, etika, nilai-nilai yang diinginkan, harga diri, disiplin diri, ketaatan terhadap ajaran Buddha atau menurut kepercayaan seseorang dan prinsip prinsip Ekonomi Kecukupan;

- 2) Pengetahuan dan keterampilan untuk berkomunikasi, berpikir, memecahkan masalah, keterampilan teknologi know-how, dan kecakapan hidup;
- 3) Kesehatan fisik dan mental yang baik, kebersihan dan preferensi untuk latihan fisik
- 4) Patriotisme, kesadaran akan tanggung-jawab dan komitmen sebagai warga negara Thailand dan anggota komunitas dunia, dan kepatuhan terhadap kehidupan demokratis dan bentuk pemerintahan di bawah monarki konstitusional, dan
- 5) Kesadaran akan perlunya melestarikan budaya Thailand dan kearifan lokal Thailand, perlindungan dan pelestarian lingkungan, dan pola pikir masyarakat dengan dedikasi untuk pelayanan publik untuk perdamaian dan co-eksistensi yang harmonis. (Dr. Ir. Yunardi, 2020)

b. Fungsi politis;

Fungsi ini merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan politik pada tingkatan sosial yang berbeda. Yaitu di Indonesia pendidikan membentuk siswa untuk mengembangkan sikap dan keterampilan kewarganegaraan yang positif untuk melatih warganegara yang benar dan bertanggung jawab. Sehingga di Indonesia seseorang yang berpendidikan lebih mengerti hak dan kewajibannya sehingga wawasan dan perilakunya semakin demokratis. Selain itu orang yang berpendidikan memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara lebih baik dibandingkan dengan yang kurang berpendidikan. (PJ, 2023)

Dalam sebuah fenomena di Indonesia di adakan pemilihan umum untuk memilih partai politik, wakil rakyat, dan memilih pemimpin negaranya yaitu Presiden, warga negara Indonesia secara sadar melaksanakan itu secara demokratis, sikap berpolitik seperti ini tentu dilakukan oleh warga negara Indonesia yang memiliki

pendidikan sebagai latar belakaang betsipak.begitu pula pada fenomena-fenomena ranah politik lainnya. (AR, 2023)

Di jepang pusat politipisme masih menggunakan Kekaisaran Jepang, oleh karena itu berpegang teguh pada pengaruh pemikiran dari konfusianisme, sama seperti Tiongkok dan Korea Selatan. Dalam Konfusianisme, pendidikan dan penanaman karakter secara kuat merupakan sesuatu yang diagungkan. Konfusianisme juga langsung menerapkan teori pendidikan dan penanaman karakter dalam praktik langsung sehingga keduanya menjadi satu kesatuan. Di lain hal, Kekaisaran Jepang dibangun atas dasar nilai luhur yang bersifat kekal dari leluhur pendirinya. Kedua jenis falsafah ini mempengaruhi pendidikan di Jepang di tiap masa (Aniswita, 2021)

Selain itu bangsa Jepang menganut ideologi pemerintahan monarki konstitusional. Ideologi ini yang menjadi landasan dari pendidikan moral di Jepang. Prinsip utama dari ideologi ini adalah penghargaan yang tinggi kepada atasan atau pimpinan. Keputusan tertinggi atas segala pengambilam keputusan dan tindakan berada dalam kewenangan Kaisar Jepang (Syamsurrijal, 2021)

Di Thailand sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa dalam kurikulumnya telah ditetapkan dasar tujuan capaian pendiddikan nomor empat bahwa siswa harus memiliki jiwa Patriotisme, kesadaran akan tanggung-jawab dan komitmen sebagai warga negara Thailand dan anggota komunitas dunia, dan kepatuhan terhadap kehidupan demokratis dan bentuk pemerintahan di bawah monarki konstitusional. (SS, 2023)

c. Fungsi budaya;

Fungsi ini merujuk pada sumbangan pendidikan pada peralihan dan perkembangan budaya pada tingkatan sosial yang berbeda. Di Indonesia pendidikan membantu siswa untuk mengembangkan kreativitasnya, kesadaran estetik serta untuk bersosialisasi dengan norma-norma,

nilai-nilai dan keyakinan sosial yang baik. Orang yang berpendidikan lebih mampu menghargai atau menghormati perbedaan dan pluralitas budaya sehingga memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap keaneka ragaman budaya. Dengan demikian semakin banyak orang yang berpendidikan akan lebih mudah terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya akan terjadi integrasi budaya nasional atau regional. (AR, 2023)

Warga negara Indonesia selalu merayakan kebudayaan daerah masing-masing, seperti di provinsi Lampung pada saat menikah melaksanakan acara angkenan bagi pengantin yang belum satu suku, maka dengan begitu mereka sudah memiliki sikap menghargai kebudayaan Lampung, suku Lampung menerima pengantin yang bukan dalam suku Lampung, begitu sebaliknya pengantin yang bukan suku Lampung menghargai berpartisipasi dalam acara tersebut, dan masih banyak lagi kebudayaan di Indonesia yang warga negaranya saling menghargai, melaksanakan dan melestarikan kebudayaannya. (PJ, 2023)

Di Jepang Pendidikan tentang seni sangat diterapkan pada siswa Jepang, agar mereka mencintai budaya tradisional negara sendiri. Hal ini merupakan gebrakan pemerintah Jepang dalam membangkitkan jiwa rasa memiliki kebudayaan negaranya. Dan agar generasinya tidak mudah mengikuti arus globalisasi dan life style western (gaya hidup barat). (Dedi Presli Halawa, 2023), (RK, 2023)

Dalam kebijakan pendidikan di Jepang, nilai-nilai kebudayaan Jepang dimasukkan bersamaan dengan nilai-nilai modernisasi setempat. Pemerintah Jepang memberikan akses bagi masyarakat untuk tetap mengelola nilai-nilai moral dalam kehidupan yang telah diajarkan oleh leluhur bangsa Jepang. (Widiuseno, 2018) Kebudayaan Jepang yang bersifat tradisional menjadi dasar bagi pendidikan karakter di Jepang. (Syamsurrijal, 2021)

Dithailand Fleksibilitas kurikulum memungkinkan integrasi budaya dan kearifan lokal sehingga konsisten dengan standar keluaran pembelajaran. Dengan diterapkannya wajib belajar, dan telah dirumuskan dalam kurikulumnya telah ditetapkan dasar tujuan capaian pendididkan nomor lima bahwa Kesadaran akan perlunya melestarikan budaya Thailand dan kearifan lokal Thailand, perlindungan dan pelestarian lingkungan, dan pola pikir masyarakat dengan dedikasi untuk pelayanan publik untuk perdamaian dan co-eksistensi yang harmonis. (SS, 2023).

d. Fungsi pendidikan;

Fungsi ini merujuk pada sumbangan pendidikan terhadap perkembangan dan pemeliharaan pendidikan pada tingkat sosial yang berbeda. Di Indonesia pendidikan membantu siswa belajar dan cara guru mengajar. Orang yang berpendidikan memiliki kesadaran untuk belajar sepanjang hayat (*life long learning*), selalu merasa ketinggalan informasi, ilmu pengetahuan serta teknologi sehingga terus terdorong untuk maju dan terus belajar. Di kalangan masyarakat luas juga berlaku pendapat umum bahwa semakin berpendidikan maka makin baik status sosial seseorang dan penghormatan masyarakat terhadap orang yang berpendidikan lebih baik dari pada yang kurang berpendidikan. Orang yang berpendidikan diharapkan bisa menggunakan pemikiran-pemikirannya yang berorientasi pada kepentingan jangka panjang. Orang yang berpendidikan diharapkan tidak memiliki kecenderungan orientasi materi / uang apalagi untuk memperkaya diri sendiri (Nurkolis, 2005; 3).

Di Jepang Tidak ada Office Boy, siswa sendiri yang mengerjakan kebersihan kelas dan sekolah. Hal ini untuk melatih siswa dalam bekerja sama, bertanggung jawab dan menjadi pekerja keras karena kebersihan sekolah Di Jepang setiap pulang sekolah jam 3 sore anak-anak bergotong-royong untuk membersihkan lingkungan sekolah yang

disebut dengan O-Soji, tidak ada petugas sekolah yang bertugas untuk membersihkan lingkungan sekolah (Dedi Presli Halawa, 2023). Dan juga sistem pendidikan di Jepang selalu menciptakan kenyamanan dan kedekatan antara siswa dengan guru melalui makan bersama di kelas saat jam istirahat. Hal ini menjadi salah satu cara untuk menghilangkan sekat antara siswa dan guru, maka seperti orang tua dan anak bahkan sahabat. Dan tidak terdapat kesenjangan sosial antara siswa kaya dan siswa miskin.

Pola Pikir Siswa Murid di Jepang lebih banyak diajarkan bagaimana memecahkan suatu masalah/ problem solving, berpikir lebih kritis dalam proses pembelajaran. Adapun transportasi Murid di Jepang lebih disarankan untuk berjalan kaki ke sekolah, menggunakan sepeda atau menggunakan sarana transportasi umum. Di Jepang anak-anak berjalan kaki atau mengendarai sepeda agar lebih sehat dan bersemangat pergi ke sekolah. Perlengkapan Sekolah Di sekolah anak-anak Jepang apabila memasuki kelas menggunakan sepatu khusus di sekolah agar kotoran tidak masuk ke dalam lantai sekolah, siswa juga menggunakan tas yang diberikan dari pihak sekolah (Surur, M., 2020). Pendidikan Jepang juga sangat memperhatikan kebutuhan anak. Sekolah bahkan menyediakan makan siang gratis untuk semua murid dan guru. Jepang juga menggratiskan biaya sekolah negeri sehingga orang tua bisa lebih fokus membiayai kebutuhan lain dari sang anak. Sekolah di Jepang juga mendidik para siswa untuk lebih bertanggungjawab terhadap masyarakat sejak dini. Oleh karenanya, sekolah-sekolah di Jepang tidak memiliki petugas kebersihan. Tanggungjawab kebersihan lingkungan sekolah mulai dari kelas, kantin hingga toilet pun dibebankan pada para murid secara berkelompok (Ican, 2023)

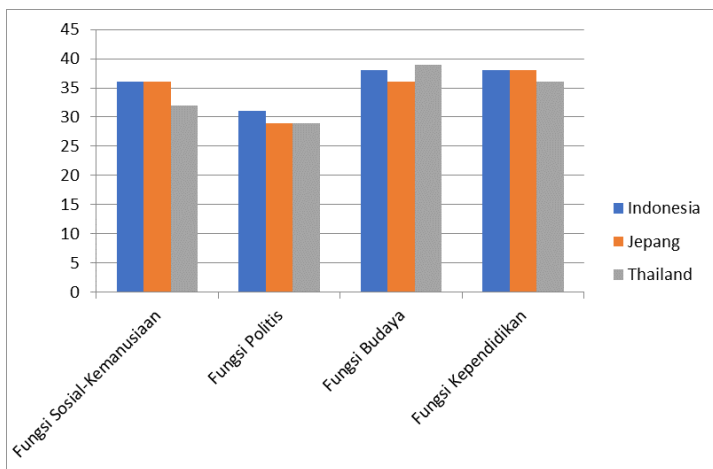
Untuk lebih menggali potensi yang dimiliki oleh siswa, sekolah dan universitas di Jepang menawarkan ekstrakurikuler dengan berbagai kegiatan. Mulai dari olahraga umum, olahraga tradisional dan lainnya. Program

ekstrakurikuler ini membuat siswa memiliki kesempatan pertukaran pelajar.

Sistem pendidikan di Jepang tidak hanya mengajarkan tentang pendidikan saja, tetapi juga mengajarkan tentang point kehidupan dan keterampilan. Negara Jepang sebagai negara tersibuk juga menekankan kedisiplinan yang menjadi satu point penting diterapkan pada sistem pendidikan mereka. (Dedi Presli Halawa, 2023)

Di Thailand telah dirumuskan dalam kurikulumnya telah ditetapkan dasar tujuan capaian pendididkan nomor dua bahwa Pengetahuan dan keterampilan untuk berkomunikasi, berpikir, memecahkan masalah, keterampilan teknologi know-how, dan kecakapan hidup. (Dr. Ir. Yunardi, 2020)

Dengan demikian dari data kuesioner disimpulkan bahwa Fungsi Non Ekonomis Dalam Investasi juga berperan aktif dapat menumbuhkan Kemanusiaan, politis, budaya dan kependidikan seseorang, perbandingannya antara tiga negara Indonesia, Jepang, dan Thailand dapat dikatakan sama-sama positif, terutama dalam fungsi budaya yang berkaitan pada negara masing-masing dan kependidikan. dan dapat di gambarkan dalam grafik berikut:



Gambar. 4. Fungsi Non Ekonomis

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu mengacu pada masukan, proses, luaran dan dampaknya. Mutu masukan dapat dilihat dari beberapa sisi antara lain (denim, 2006, hal. 53);

1. Pada mutu masukan pendidikan

Mutu masukan pendidikan pada kategori SDM yaitu kondisi masukan sumber daya manusia, seperti kepala sekolah, guru, laboran, staf tata usaha, dan siswa. dimulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kerja, hubungan kerja, sampai pada imbal jasa. Pengelolaan didasarkan pada azas demokrasi. Salah satu wujud langkah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan mutu SDM yang dibutuhkan

Di Indonesia prosesi seleksi, rekrutmen dan penempatan tenaga guru dan staf adalah seleksi dan rekrutmen melalui ketetapan pemerintah bagi yang PNS dan melalui kebijakan pimpinan setempat bagi swasta atau non PNS disesuaikan dengan spesifikasi dan spesifikasi pendidikannya. Adapun proses pengembangan SDM dilakukan melalui pelatihan sistem pengujian, peningkatan kedisiplinan guru dan karyawan. (Rusdiani, Investasi Pen (AR, 2023)

Di Jepang tergolong tingkat kesejahteraan guru tinggi, Pendidikan yang berkualitas membutuhkan guru yang berkualitas. Untuk menjamin tingginya kualitas tenaga pendidik, Jepang menjamin kesejahteraan para guru. Sebagai contoh, guru bahasa Inggris di Jepang memiliki gaji sebesar US\$ 2.250 hingga US\$ 286.000 per bulan. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan gaji jenis pekerjaan lainnya. Agar lebih fokus dan meringankan pekerjaannya, setiap guru yang mengajar di jenjang pendidikan SMP hanya fokus mengajar satu mata pelajaran saja. (Foreducation, 2021) (RK, 2023)

Di Thailand Sistem perekrutan guru dilakukan secara tersentralisasi secara terbuka dimana calon mengetahui syarat-syarat akademik dan non-akademik yang diminta. Ujian saringan penerimaan guru dilakukan secara serentak di berbagai wilayah di Thailand. Peningkatan kualitas guru dilakukan dengan berbagai program seperti program pendidikan guru 5 tahun dengan beasiswa guna menarik calon-calon guru yang cemerlang. Kualifikasi guru minimum harus memiliki gelar sarjana dengan lama pendidikan 4 tahun. Pengembangan guru dilakukan dengan berbagai bentuk mulai dari pelatihan dan studi lanjut master bahkan doktor. (SS, 2023)

Kantor Komisi Guru Negeri dan Pegawai Sekolah bertanggung-jawab mengevaluasi kebutuhan guru dan merekrut guru secara nasional setiap tahun. Kantor ini yang akan memberikan ujian seleksi penerimaan guru secara nasional. Dalam pelaksanaan ujian seleksi penerimaan guru berlaku aturan-aturan berikut yang harus ditaati oleh semua pihak yang terlibat (Dr. Ir. Yunardi, 2020):

- a. Seluruh proses ujian masuk harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, harus transparan dan dapat diverifikasi.
- b. Ujian harus dilaksanakan pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Kantor Komisi Guru Negeri dan Pegawai Sekolah
- c. Komite Ujian dapat memutuskan institusi pendidikan mana yang bertanggung-jawab untuk menyusun soal,

mendistribusikan, mengumpulkan dan mengevaluasi jawaban.

- d. Pengumuman ujian penerimaan guru harus dilaksanakan ke masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum ujian dilaksanakan. Pengumuman harus secara jelas mencantumkan hal-hal berikut: • Posisi dan gaji yang ditawarkan • Jumlah yang akan diterima • Deskripsi Pekerjaan • Kualifikasi umum dan khusus • Prosedur aplikasi, biaya dan jadwal ujian • Dokumen dan identitas yang diperlukan • Kriteria kelulusan • Persyaratan lainnya
- e. Waktu penerimaan lamaran tidak boleh kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum ujian dimulai.
- f. Jika pelaksanaan ujian harus dilakukan di beberapa wilayah pada hari yang sama, maka setiap pelamar hanya bisa ikut ujian di satu wilayah saja. Jika nama yang bersangkutan muncul di wilayah lain, maka yang bersangkutan akan didiskualifikasi.
- g. Seorang pelamar dinyatakan lulus jika peserta mendapatkan nilai lebih dari 60% untuk setiap bagian yang diuji.

Selain itu aturan lainnya yang pada hakikatnya mengarahkan penerimaan guru dilaksanakan secara jujur, terbuka dan transparan. Perlu dicatat bahwa sistem penerimaan guru masih dikendalikan dengan cara sentralisasi, walaupun pelaksanaan ujian dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah di Thailand. Kualifikasi guru yang diterima di sekolah-sekolah di Thailand minimum harus memiliki pendidikan sarjana 4 tahun dan maksimum memiliki pendidikan. Dengan perubahan paradigma pendidikan dari situasi yang berpusat kepada guru (teacher-centered) ke yang berpusat kepada siswa (learner-centered), maka seorang guru harus bisa berfungsi sebagai fasilitator sehingga siswa mandiri dalam berfikir, bertindak dan memecahkan masalah dengan tetap mengedepankan nilai-nilai etika dan moral. Berdasarkan reformasi pendidikan sekarang ini, guru-guru Thailand

didorong dan didukung untuk mendapatkan pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pelatihan-pelatihan berikut merupakan aktifitas yang khusus disiapkan bagi guru dan pegawai sekolah antara lain (Dr. Ir. Yunardi, 2020):

- a. Pengembangan Program Pendidikan Lima Tahun Pra-Tugas
Program ini menghendaki calon guru menyelesaikan sarjana lima tahun sebelum bertugas menjadi guru atau diterima menjadi guru, yang terdiri dari 4 (empat) tahun kuliah dan 1 (satu) tahun pelatihan mengajar di sekolah yang telah ditentukan. Lulusan dari luar jurusan pendidikan guru yang akan menjadi guru harus mengikuti program bersertifikat 1 tahun sebelum disertifikasi untuk menjadi guru.
- b. Pelatihan bagi guru tetap Bahasa Inggris Sejumlah instansi, termasuk Kantor Komisi Pendidikan Vokasi melaksanakan aktifitas pelatihan untuk guru Bahasa Inggris di bawah pengawasan instansi tersebut. Pada Kantor Komisi Pendidikan Dasar, guru-guru di bawah direktorat ini dilatih berdasarkan Rencana Strategis Reformasi Proses Pembelajaran Bahasa Inggris untuk Percepatan Kemampuan Kompetitif Nasional. Yaitu dengan menetapkan kriteria pelatihan guru Bahasa Inggris melalui kerja sama dengan institusi lain, terutama dengan *English Resource and Instructional Centres* (ERIC) di seluruh wilayah Thailand dan British Council serta American University Alumni (AUA), dengan bantuan pendanaan dari Pemerintah.
- c. Pelatihan Guru Tetap Matematika dan Sains Institut Promosi Pengajaran Sains dan Teknologi, sebuah lembaga independen di bawah supervisi Kementerian Pendidikan, merupakan salah satu organisasi yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan pengembangan guru, supervisor dan tenaga administrasi dalam bidang sains, matematika dan teknologi informasi.
- d. Penyelesaian Sarjana Pendidikan Bagi Guru Tetap. Menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1999, sertifikasi profesi mengajar diwajibkan bagi seorang guru

tetap dan direktur sekolah dimana untuk mendapatkan sertifikat tersebut calon harus memiliki kualifikasi minimum sarjana dalam bidang pendidikan. Universitas Rajabhat (sejenis universitas pendidikan di Indonesia) telah melaksanakan program khusus ini bagi guru-guru yang belum memiliki kualifikasi sarjana. Berdasarkan laporan dari kementerian Pendidikan sejak tahun 2008 seluruh guru di Thailand telah memenuhi kualifikasi minimum sarjana.

- e. Program Sertifikat dan Pasca-Sarjana Pendidikan Guru-guru yang kualifikasi sarjananya bukan dari bidang pendidikan didorong untuk mengikuti program bersertifikat atau pasca sarjana pendidikan.
- f. Program bersertifikat bagi Tenaga Administrasi Tenaga Administrasi Kependidikan harus memiliki sertifikat. Untuk mendapatkan sertifikat ini, seseorang harus memiliki kualifikasi sarjana atau Post-Graduate Certificate dalam bidang Administrasi Pendidikan jika sarjananya bukan berasal dari bidang pendidikan. Universitas Pendidikan Rajabhat memiliki program sertifikasi bagi tenaga-tenaga administrasi sekolah. Program ini dilaksanakan di sekolah terkait atau di kota dimana sekolah tersebut berada. Sehingga tenaga-tenaga administrasi dari berbagai sekolah di satu daerah dapat mengikuti program sertifikat ini tanpa harus meninggalkan tempat kerja.
- g. Program Master bagi tenaga administrasi Tenaga administrasi pendidikan yang memiliki gelar sarjana didorong untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pasca sarjana dalam bidangnya.

Mutu masukan pada kategori sarana prasarana dijelaskan bahwa di Indonesia masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah, dan lain-lain. disediakan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan seperti DEPAG bagi lembaga pendidikan di bawah naungan kementerian agama, dan DEPDIBUD bagi lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian pendidikan dan

kebudayaan, peralatan dan perlengkapan tersebut yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan. Khususnya dalam proses belajar mengajar. Seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Dan prasarana pendidikan yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan dan pengajaran, seperti halaman, parkir, lapangan, jalan menuju sekolah, yang dimanfaatkan secara optimal guna mendukung kelancaran proses pembelajaran. (PJ, 2023)

Seluruh program pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan disosialisasikan kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, pengelolaan sarana dan prasarana direncanakan secara sistematis agar selaras dengan pertumbuhan kegiatan akademik dengan mengacu standar sarana dan prasarana. Pada pengelolaan perpustakaan dengan menyediakan petunjuk pelaksanaan operasional peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya, merencanakan fasilitas peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan pendidik, melengkapi fasilitas peminjaman antar perpustakaan, baik internal maupun eksternal. (AR, 2023)

Dan pengelolaan laboratorium dikembangkan sejalan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilengkapi dengan manual yang jelas sehingga tidak terjadi kekeliruan sehingga menimbulkan kerusakan. Dan pengelolaan fasilitas fisik untuk kegiatan ekstrakurikuler disesuaikan dengan perkembangan kegiatan ekstrakurikuler peserta didik dan mengacu pada standar sarana dan prasarana.

Di Jepang meratanya kualitas sekolah salah satu faktor yang membuat pendidikan di Jepang berkualitas adalah meratanya infrastruktur pendidikan di negeri ini. karena pendidikannya yang bermutu, pemerintah Jepang memastikan semua sekolah di tiap daerah mendapatkan pendanaan dan dukungan yang sama (Foreducation, 2021)

Di Thailand segala fasilitas sarana dan prasarana sekolah negeri seluruhnya berasal dari Pemerintah. Sekolah-sekolah mengusulkan kebutuhan pembiayaan kepada Dinas Pendidikan Wilayah, yang selanjutnya setelah dikompilasi oleh Dinas akan diteruskan Kantor Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar atau Kantor Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah tergantung jenjang sekolahnya. Setelah Kantor Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah ini melakukan kompilasi dari seluruh wilayah, usulan diteruskan ke Kementerian Pendidikan, Selanjutnya usulan ini disampaikan pada sidang kabinet. Persetujuan besaran usulan anggaran dari setiap kementerian baru akan sah setelah mendapat persetujuan dari parlemen Thailand. Dalam hal ini proses pengusulan anggaran pada hakikatnya sama persis seperti di Indonesia. Dalam pelaksanaan pendanaan, pembiayaan seluruh sekolah dasar dan sekolah menengah negeri dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah., siswa mendapatkan berbagai keuntungan tambahan dari Pemerintah seperti mendapatkan susu dan makan siang gratis yang disediakan oleh sekolah melalui pendanaan dari Kementerian Pendidikan. Selain itu, siswa juga mendapatkan bantuan buku teks dan alat tulis gratis yang didistribusi sekolah kepada murid-murid. Baju seragam, sepatu dan tas biasanya dibeli lebih dahulu pada akhir semester diganti biayanya oleh sekolah, setelah sekolah Dinas pendidikan Wilayah. Pemerintah membiayai operasional dan perawatan sekolah mencakup pengadaan kebutuhan Alat Tulis Kantor (perpustakaan, perbaikan, pengadaan alat kantor dan laboratorium. Secara suk beberapa sekolah meminta kontribusi dari orang tua untuk kegiatan dan pengadaan guru asing, namun sifatnya tidak memaksa.

Pada aspek Informasi dan Komunikasi (TIK) sejak usia dini melalui program Tablet Per Child atau disingkat OTPC. Proyek ambisius ini bertu siswa-siswa dengan pedagogi mutakhir dan pembelajaran tanpa kenda dan latar belakang ekonomi siswa. Pemerintah Thailand sampai mengeluarkan dana sebesar 3 milyar bath atau setara dengan 96 membeli

sebanyak 900 ribu komputer tablet untuk keperluan p awal tahun 2013 sebanyak 868.886 tablet telah dibagikan kepada atau kelas 1 SD di seluruh Thailand, seperti yang ditunjukkan pada Gambar ini merupakan kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian ICT Thailand. Gambar 6.1 Pembelajaran menggunakan tablet pada siswa Prathom Dalam pembelian komputer tablet ini, Pemerintah Thailand melakukan p harga dan spesifikasi teknis dari sejumlah pabrik. Akhirnya memutuskan untuk membeli komputer tablet ini dari sebuah perusa 2460 Bath per unit (setara 750 ribu rupiah) dengan sistem operasi Google ng didistribusikan oleh oleh orang tua, lalu sekolah menagih kepada dan pengadaan serta Alat Tulis Kantor (ATK), buku atorium. Secara sukarela kegiatan ekstra-kurikuler ngenalan Teknologi program yang disebut One ni bertujuan memperkuat kendala lokasi, jarak, sampai saat ini telah 96 juta USD untuk rluan pendidikan. Sampai kepada siswa Prothom 1. (Dr. Ir. Yunardi, 2020), (SS, 2023)

Dalam pembelian komputer tablet ini, Pemerintah Thailand melakukan p harga dan spesifikasi teknis dari sejumlah pabrik. Akhirnya memutuskan untuk membeli komputer tablet ini dari sebuah perusa 2460 Bath per unit (setara 750 ribu rupiah) dengan sistem operasi Google ng didistribusikan oleh oleh orang tua, lalu sekolah menagih kepada dan pengadaan serta Alat Tulis Kantor (ATK), buku atorium. Secara sukarela kegiatan ekstra-kurikuler ngenalan Teknologi program yang disebut One ni bertujuan memperkuat kendala lokasi, jarak, sampai saat ini telah 96 juta USD untuk rluan pendidikan. Sampai kepada siswa Prothom 1 Gambar 6.1. Projek dan Kementerian ICT Prathom 1 di Thailand and melakukan perbandingan irnya Pemerintah ah perusahaan Cina seharga operasi Google Android 4 Ice Cream sandwich dan spesifikasi tablet 1 GB RAM, kapasitas penyimpanan 8G (Dr. Ir. Yunardi, 2020)B. Harga tersebut telah termasuk materi pendidikan yang dimasukkan ke dalam tablet. Perlu dicatat bahwa komputer tablet ini bukan saja dibagikan kepada siswa-

siswa Prathom 1 sekolah negeri, tetapi juga kepada siswa-siswa Prathom 1 di sekolah swasta. (Dr. Ir. Yunardi, 2020)

Berkenaan dengan pendanaan sekolah swasta, di Thailand terdapat 3 jenis sekolah swasta, seperti dijabarkan sebagai berikut :

- a. Sekolah swasta yang mendapat 70 persen subsidi dari Pemerintah, dimana sekolah menetapkan SPP tertinggi sesuai dengan yang diatur oleh Pemerintah;
- b. Sekolah swasta yang sama sekali tidak menerima subsidi dari pemerintah, dimana sekolah menentukan besarnya SPP yang ditarik dari siswa dan jelas jauh lebih tinggi dari sekolah yang sebelumnya dan
- c. Sekolah swasta yang mendapat subsidi 100 persen dari Pemerintah, misalnya sekolah yang didirikan oleh organisasi keagamaan, atau sekolah bagi anak-anak kurang beruntung secara fisik.

Tabel berikut ini menunjukkan bentuk kontribusi pemerintah Thailand untuk sekolah swasta yang masing-masing menerima subsidi 70 dan 100 persen.

Tabel.11. Bentuk Subsidi Pemerintah Thailand terhadap sekolah swasta

Bentuk Subsidi Pemerintah Thailand kepada sekolah swasta	
Katagori A	Katagori C
Buku teks	Buku teks
Peralatan pendidikan	Peralatan pendidikan
Seragam (jika diusulkan)	Seragam
Aktifitas ekstra kurikuler	Aktifitas ekstra kurikuler
Susu (hanya untuk Prathom)	Susu (hanya untuk Prathom)
Makan siang (jika diusulkan)	Makan siang
	Komputer/peralatan laboratorium
	Biaya konstruksi dan peraawatan

2. Mutu Proses Pendidikan

Mutu proses pendidikan pada bidang pembelajaran mengandung makna kemampuan sumber daya sekolah mentransformasikan multijenus masukan dan situasi untuk mencapai derajat nilai tambah tertentu bagi peserta didik. dan dalam mutu proses ini terlibat berbagai input seperti bahan ajar, metodologi, sarana dan prasarana sekolah, dukungan administrasi, manajemen, sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Dengan mensinergikan semua komponen tadi guna mendukung proses pembelajaran. Adapun proses dalam hal ini adalah efektifitas proses belajar mengajar tinggi, fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, kurikulum yang relevan dan sesuai undang-undang, dan yang terakhir adalah pengelolaan tenaga kependidikan (administrasi) yang efektif, lembaga pendidikan, yang juga dilakukan oleh teamwork yang kompak, cerdas, dinamis; memiliki kemandirian, dan juga melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan (improvisasi). secara lebih detail dapat dijelaskan sebagai berikut

Di Indonesia mutu efektifitas proses pembelajaran menggunakan metode yang dapat mengaktifkan dan memandirikan siswa dalam pembelajaran. Adapun dalam aplikasinya, seluruh materi dilembaga pendidikan terus mengembangkan dan menyesuaikan dengan desain (prinsip-prinsip) pembelajaran yang berlaku, saat ini salah satunya dengan *Problem Base Learning* (PjBL), dengan menggunakan metode pendekatan *Student Active Learning*, artinya dalam proses pembelajaran siswa aktif menggali berbagai masalah dan menentukan solusi yang tepat, sedangkan guru sebagai fasilitator dan motivator yang mampu mengubah sikap siswa yang kurang berminat belajar menjadi mau dan senang belajar, dengan penuh motivasi. (AR, 2023)

Guru juga melaksanakan evaluasi proses belajar dengan ulangan harian, tugas siswa, dan evaluasi hasil belajar pada setiap bulan dan setiap akhir tahun. Dan menentukan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di setiap mata pelajaran. Secara

sistematis dan baik serta benar. Adapun mutu kurikulum di Indonesia dengan melakukan tinjauan terus menerus sesuai perkembangan dan kebutuhannya yaitu Kepala sekolah melalui waka kurikulumnya menyusun kurikulum dengan memperhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, meningkatkan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik. Sesuai kebijakan pemerintah. Dan juga saat ini di Indonesia sedang melaksanakan Kurikulum Merdeka belajar. (PJ, 2023)

Di Jepang Kementerian Pendidikan membuat keputusan nasional terkait kebijakan pendidikan. Sistem pendidikan Jepang menolak adanya perbedaan Siswa yang memiliki hasil lebih baik dalam bidang akademis, karena seluruh sekolah harus menerima siswa tetap sekolah, karena kurikulum Jepang memungkinkan tidak jauh berbeda dengan kurikulum Internasional, maka yang hasil sekolahnya lebih baik dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan lebih cepat di Amerika Serikat, Kementerian Pendidikan Jepang juga memutuskan konteks edukasi yang tak disetujui oleh kementerian seperti aktivitas relawan dan komunitas, home education. (Dedi Presli Halawa, 2023)

Di Jepang juga memberikan otonomi yang luas bagi tiap sekolah di daerah untuk menyusun kurikulum dan sistem penilaiannya sendiri. Dengan demikian, sekolah memiliki cara pandang yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya. Meskipun kualitas sekolah di Jepang cukup merata, para siswa tetap berlomba-lomba untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke sekolah maupun universitas favorit. Karena persaingannya tinggi, para siswa pada umumnya mengambil sekolah non formal sebagai pelajaran tambahan usai sekolah formal. Institusi penyelenggara pendidikan tambahan ini dinamai Yobiko (Foreducation, 2021),

Menerapkan *Student Centered Learning* Sekolah di Jepang menerapkan sistem pendidikan yang menempatkan murid sebagai pusat pembelajaran. Murid juga dididik untuk belajar secara independen dan berperan aktif dalam perkembangan

akademik teman-temannya. Sebagai contoh, dalam kebanyakan pelajaran matematika di Jepang, sebuah kelas akan dimulai dengan memecahkan soal yang diberikan guru di papan tulis. Guru akan meminta murid yang bisa mengerjakan soal untuk maju, kemudian akan mengawasi dan membantu murid jika diperlukan.

Setelah soal berhasil dipecahkan, selanjutnya, guru akan memberikan soal kedua dan meminta murid lain untuk memecahkan soal tersebut. Namun, kali ini yang bertugas untuk mendampingi dan membantu murid kedua untuk menyelesaikan soal adalah murid pertama.

Sistem pendidikan di Jepang juga menerapkan pendidikan karakter terlebih dahulu baru pengetahuan, hal ini merupakan Salah satu alasan mengapa karakter manusia Jepang sangat unik dan khas adalah karena porsi pendidikan karakter di Jepang cukup besar. Bahkan, seorang siswa di Jepang tidak mengikuti ujian hingga usia siswa mencapai 10 tahun. Oleh karenanya, di tahun-tahun awal, pendidikan lebih difokuskan untuk membentuk karakter, mengajarkan sopan santun, menghormati orang lain, menjadi murah hati, empati bahkan diajarkan bersikap lembut terhadap hewan dan alam.

Kemudian integrasi teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka Jepang berhasil memanfaatkan teknologi untuk mentransformasikan pendidikannya. Tujuannya agar generasi Jepang siap menghadapi Society 5.0. Di Jepang, *ebook* telah menggantikan buku cetak dan siswa dapat mengunduh buku pelajaran melalui *website* sekolah. Internet berkecepatan tinggi juga menjadi salah satu syarat utama yang harus ada di setiap sekolah. (Dedi Presli Halawa, 2023)

Sekolah juga tidak lagi membebankan tugas administrasi seperti membuat soal ujian dan melakukan penilaian. Untuk meringankan beban guru, pekerjaan administrasi disederhanakan dengan adopsi *Learning Management System* di setiap sekolah. Jepang bahkan mulai memperkenalkan robot sebagai asisten guru. (Rika, 2023)

Di Jepang terdapat lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan informal. Lembaga pendidikan formal adalah sekolah yang menggunakan kurikulum sebagai acuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Sekolah ini memiliki lingkungan yang membentuk perilaku dan kepribadian siswa. Sementara lembaga pendidikan informal dikenal di Jepang sebagai juku. Lembaga pendidikan ini khusus memberikan bantuan kepada siswa terhadap pelajaran yang kurang mampu dipelajarinya dengan baik di sekolah. (Ningrum, 2017)

Sama seperti Indonesia, sistem pendidikan Jepang menggunakan format 6-3-3-4 yakni enam tahun pendidikan dasar, tiga tahun pendidikan menengah, tiga tahun pendidikan menengah atas dan 4 tahun universitas (ican-education.com) Jepang memiliki beberapa jenjang. Di Jepang juga memiliki program wajib belajar sembilan tahun. Hal yang juga paling menonjol dari Jepang adalah tingkat kedisiplinan yang tinggi. Selain itu ada poin lainnya yang menjadi ciri khas dari sistem ini.

a. Jenjang Pendidikan

Jepang menerapkan wajib belajar selama sembilan tahun. Enam tahun untuk Sekolah pendidikan dasar dan tiga tahun untuk pendidikan menengah bawah. Tetapi uniknya sistem pendidikan di Jepang dibagi menjadi 6 tahun untuk pendidikan dasar dan 6 tahun pendidikan menengah. Untuk pendidikan menengah ini dibagi lagi menjadi 2 yaitu 3 tahun untuk pendidikan menengah bawah dan tiga tahun pendidikan menengah atas.

Setelah lulus dari sistem pendidikan menengah bisa dilanjutkan ke tingkat pendidikan menengah atas selama tiga tahun, atau diploma atau sekolah tinggi kejuruan. Siswa yang sudah lulus pada tingkatan ini bisa melanjutkan untuk ke perguruan tinggi. (Fittryati 2020).

Di Jepang pendidikan pada tingkat sekolah di bagi menjadi dua yaitu (Novi Handayani 2017):.

- 1) Sekolah negeri yang biasanya disebut koritsu gakko.

Sekolah negeri itu dikepalai atau diselenggarakan oleh pemerintah kota atau yang disebut prefektur. Tetapi ada beberapa juga sekolah yang dikelola oleh prefektur dan pemerintah pusat. Di sekolah negeri biasanya siswa mulai masuk mulai dari hari senin hingga hari jumat

- 2) Sekolah Swasta disebut juga dengan shiritsu gakko

Sekolah ini diselenggarakan oleh badan hukum, disekolah ini pembelajaran dilaksanakan selama 1 minggu full dari senin sampai sabtu,

Di sekolah Jepang biasanya membagi setahun ajaran menjadi tiga caturwulan dan dibagi atas tiga musim, yaitu musim gugur/ fall, musim salju/ snow serta musim panas/ summer yang waktunya cenderung lama dan panjang. Akan tetapi di Jepang juga ada Taman Kanak-kanak yang biasanya disebut dengan youchien, ada juga sekolah hoikuen. Perbedaan antara youchien dengan hoikuen adalah apabila youchien jam sekolahnya mulai pukul 08.50-13.30, sedangkan youchien mulai dari 07.00-19.00 waktunya lebih lama dan lebih panjang, youchien diperuntukkan untuk anak-anak yang orangtuanya bekerja. Untuk anak-anak yang ingin dimasukkan ke youchien harus ada surat keterangan bahwa kedua orangtua bekerja (Muzaki 2020).

b. Kalender Tahun Akademik

Jepang memulai tahun pembelajaran baru mulai bulan September atau Oktober. Lalu kalender akademik tahunan mereka dibagi menjadi 3 bagian yaitu. 1 September-26 Desember, 7 Januari-25 Maret dan 1 April-20 Juli. Untuk libur sekolah didapatkan siswa selama 6 minggu yaitu pada musim panas dan libur 2 minggu pada musim dingin dan semi.

Sekolah di Jepang biasanya menerapkan masuk belajar selama lima hari pada satu minggu yaitu antara hari Senin sampai Jumat. Tetapi ada juga sekolah yang masih

menerapkan sekolah 6 hari masuk. Uniknya lagi, setelah selesai proses pembelajaran siswa diwajibkan untuk membersihkan kelas lalu mengikuti ekstrakurikuler atau disebut dengan students clubs. ican-education.com (system, 2021) dapat ditampilkan dalam tabel berikut

Tabel,12. Kerangka jenjang Sekolah Jepang

Usia	Kelas	Lembaga pendidikan	
6	1	<u>Sekolah dasar</u> (小学校, <i>shōgakkō</i>)	
7	2		
8	3		
9	4		
10	5		
11	6		
12	7	<u>Sekolah menengah pertama</u> (中学校, <i>chūgakkō</i>)	
13	8		
14	9		
15	10	<u>Sekolah menengah atas</u> (高等学校, <i>kōtōgakkō</i>) disingkat <i>kōkō</i> (高校)	<u>Sekolah teknik/politeknik</u> (高等専門学校, <i>kōtō senmongakkō</i>) disingkat <i>kōsen</i> (高専)
16	11		
17	12		
18		<u>Universitas</u> (大学, <i>daigaku</i>) (strata 1: 4 tahun)	
19			
20			
21		<u>Akademi</u> (短期大学, <i>tanki daigaku</i>) (strata 1: 2 tahun)	

Di Thailand proses pembelajaran didasarkan pada reformasi pendidikan yang diatur menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1999. Perubahan-perubahan yang signifikan dari reformasi pendidikan terus dilakukan terletak pada implementasi kebijakan yang beragam, fleksibilitas dari implementasi kebijakan tersebut, desentralisasi, penjaminan mutu, pelatihan peningkatan kualitas guru di seluruh jenjang dan mobilisasi sumber daya. Upaya peningkatan tersebut mencakup:

- 1) Perluasan wajib belajar sampai pendidikan menengah pertama dan pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan menengah atas.
- 2) Reformasi kurikulum pendidikan dasar, pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat
- 3) Pendirian Kantor Standar Pendidikan Nasional dan Penilaian Kualitas (Office for National Education Standards and Quality Assessment, ONESQA), yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kualitas eksternal. (Dr. Ir. Yunardi, 2020)

B. Tujuan Kurikulum Inti Pendidikan

1. Tujuan Kurikulum bagi Pendidikan

Kurikulum Inti pendidikan menegaskan proses pembelajaran dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas seluruh siswa yang merupakan kekuatan utama negara sehingga mendapatkan pengembangan yang seimbang di seluruh aspek – kekuatan fisik, ilmu pengetahuan dan moralitas. Anak didik diharapkan sadar terhadap komitmen dan tanggungjawabnya sebagai warga negara Thailand juga sebagai anggota komunitas dunia. Terikat bentuk pemerintahan demokrasi di bawah konstitusi monarki, anak didik harus dibekali dengan pengetahuan dasar dan ketrampilan-ketrampilan penting dan karakter yang baik bagi studi lanjut, kecakapan hidup dan belajar sepanjang hidup. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran

berpusat kepada anak didik perlu dilaksanakan, yang berlandaskan pada kenyataan bahwa setiap orang punya kemampuan untuk belajar dan mengembangkan diri untuk mencapai potensi tertinggi masing-masing.

Kurikulum Inti Pendidikan bertujuan menanamkan kepada peserta didik lima kompetensi kunci berikut (Dr. Ir. Yunardi, 2020):

- a. Kemampuan Komunikasi Siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menerima dan mengirimkan informasi, kemampuan dan ketrampilan berbahasa dalam mengungkapkan pikiran, pengetahuan dan pemahaman, perasaan dan pendapat untuk bertukar informasi dan pengalaman, yang akan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat; kemampuan negosiasi untuk memecahkan atau mengurangi masalah dan konflik; kemampuan untuk membedakan dan memilih apakah akan menerima atau menghindari informasi melalui penalaran yang tepat dan penilaian yang tepat; dan kemampuan untuk memilih metode komunikasi yang efisien, mengingat kemungkinan efek negatif terhadap diri sendiri dan masyarakat.
- b. Kemampuan Berfikir Kurikulum Pendidikan Dasar Thailand 11 Atase Pendidikan KBRI Bangkok Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok Siswa diharapkan memiliki kemampuan berfikir analitis, sintesis, konstruktif, berpikir kritis dan sistematis yang mengarah kepada penelaahan pengetahuan atau informasi guna pengambilan keputusan yang bijaksana bagi dirinya sendiri dan masyarakat.
- c. Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk mereduksi masalah dan hambatan, berdasarkan alasan yang tepat, prinsip-prinsip moral dan informasi yang akurat; kemampuan untuk mengapresiasi hubungan dan perubahan-perubahan dalam berbagai situasi sosial; kemampuan mencari dan menerapkan pengetahuan untuk mencegah dan memecahkan permasalahan; dan kemampuan untuk

pengambilan keputusan yang bijaksana, dengan mengantisipasi kemungkinan efek negatif terhadap dirinya sendiri, masyarakat dan lingkungan.

- d. Kemampuan Menerapkan Kecakapan Hidup Siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk menerapkan berbagai proses dalam kehidupan sehari-hari, seperti belajar mandiri; belajar terus menerus, bekerja, dan harmonisasi sosial melalui penguatan hubungan interpersonal yang menyenangkan; kemampuan mereduksi masalah dan konflik melalui cara-cara yang tepat; kemampuan untuk penyesuaian diri untuk mengikuti perubahan sosial dan lingkungan; dan kemampuan untuk menghindari perilaku yang tidak diinginkan yang dapat memberikan efek buruk kepada dirinya sendiri dan juga orang lain.
- e. Kemampuan Menerapkan Teknologi Siswa diharapkan memiliki kemampuan memilih dan menerapkan teknologi yang berbeda; memiliki keterampilan dalam penerapan proses teknologi untuk pengembangan diri sendiri dan masyarakat dalam hal pembelajaran, komunikasi, pekerjaan dan pemecahan masalah melalui cara-cara yang konstruktif, tepat, bersesuaian dan beretika

Kurikulum Inti Pendidikan Dasar berfokus pada pengembangan peserta didik untuk memiliki karakter yang diinginkan seperti berikut ini, sehingga memungkinkan peserta didik menikmati hidup yang selaras antara satu sama lain sebagai warga negara Thailand dan warga dunia: 1). Cinta kepada bangsa, agama dan Raja, 2). Kejujuran dan integritas 12 Sistem Pendidikan di Thailand Atase Pendidikan KBRI Bangkok Kedutaan Besar Republik Indonesia Bangkok 3). Kedisiplinan diri 4). Antusiasme untuk belajar 5). Kepatuhan terhadap prinsip Filsafat Kemandirian Ekonomi 6). Dedikasi dan komitmen untuk bekerja 7). Menghargai nilai-nilai yang berlaku di Thailand. (Dr. Ir. Yunardi, 2020)

a. Mutu Luaran Pendidikan

Mutu Luaran adalah mutu hasil dengan melahirkan keunggulan akademik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. (denim, 2006, hal. 53-54)

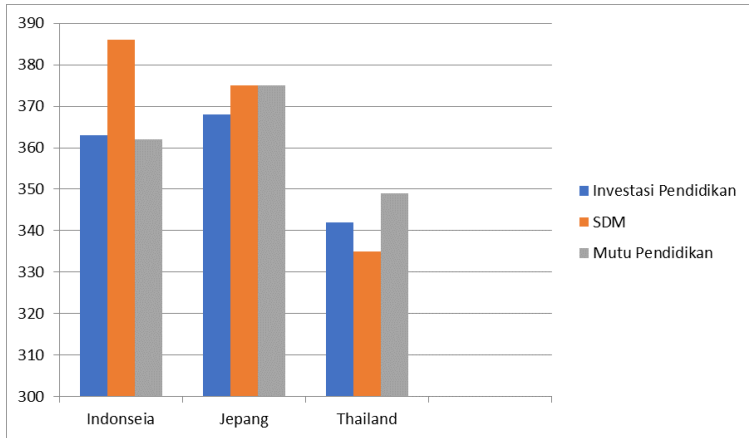
Di Indonesia mutu luaran dilakukan untuk meningkatkan output yang berkualitas, maka pimpinan, waka kurikulum, waka humas, guru dan seluruh komponen sekolah berusaha untuk meningkatkan kinerja lembaga, kinerja lembaga dalam hal ini adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses sekolah diukur dari kualitas sekolah, efektivitasnya, efisiensinya, produktivitasnya, inovasinya dan moral kerjanya baik yang akademik maupun yang non akademik. (Putri, 2023)

Dan juga banyak lulusan yang memiliki nilai tambah bagi dirinya sehingga mampu berdaya saing, berproduktifitas tinggi, yaitu memiliki pendapatan, baik bekerja pada instansi dan lembaga, maupun memiliki lapangan kerja sendiri.

Di Jepang sebagai salah satu negara maju didunia sudah tidak diragukan bahwa mutu pendidikannya yang baik akan berimplikasi positif terhadap mutu lulusan yang berkiprah di kancah dunia. (RK, 2023)

Di Thailand juga menjaga mutu lulusannya, kebanyakan mereka telah berkontribusi terhadap negaranya, bahkan ke manca negara, salah satu lulusannya ada yang telah bekerja dan menjadi pejabat tinggi di KBRI, dan begitu juga pada instansi negeri maupun swasta. (SS, 2023)

Dengan demikian dari data kuesioner disimpulkan bahwa investasi pendidikan pada sumberdaya manusia dapat meningkatkan mutu pendidikan, perbandingannya antara tiga negara Indonesia, Jepang, dan Thailand dapat dikatakan sama-sama positif, dan dapat di gambarkan dalam grafik berikut:



Gambar. 4. Mutu Pendidikan Global

Adapun mutu pendidikan yang mengacu pada mutu masukan, mutu proses, mutu luaran dan dampaknya pada tiga negara yaitu Indonesia, Jepang, dan Thailand semua mengacu pada mutu pendidikan yang ditetapkan pada standar mutu negara masing-masing, dan seluruh data yang terkumpul menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia, Jepang, dan Thailand telah memenuhi standar mutu yang berlaku, sesuai pada ke khasan dan falsafah pendidikan masing-masing negara. Untuk lebih jelasnya dapat ditegaskan pada tabel berikut:

Tabel. 13. Investasi Pendidikan Pada Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Global

INDIKATOR	INDONESIA	JEPANG	THAILAND	KESIMPULAN
INVESTASI PENDIDIKAN (Nurholis, 2005) 1. Pendidikan Sebagai Alat Perkembangan an Ekonomi	1. Pendidikan merupakan investasi modal manusia (<i>human capital investment</i>) dan menjadi <i>leading sektor</i> serta merupakan sektor utama pemerintahnya dengan anggaran 20% dari APBN diaplikasikan pada bantuan oprasional sekolah dari sekolah dasar sampai dengan pendidikan tinggi, hal ini menunjukkan komitmen pemerintahnya membangun SDM melalui pendidikan 2. Gaijih dan tunjangan guru dan lain lain pada PNS dan UMR terus ditingkatkan, sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkolerasi dengan kemajuan	1. Tingginya mutu SDM dari kesuksesan bangsajepang dalam meningkatkan dan mempertahankan kualitas pendidikan 2. Sistem pendidikan di atur oleh Kementerian Pendidikan Jepang. Sebab hanya menyetujui pendidikna yang diakui kementerian. Hal ini merupakan komitmen pemerintah dalam menjaga kefektifan pendidikan guna meningkatkan SDM agar lebih terampil dan terarah menjadi manusia yang profesional dalam meraih ekonomi nasional.	1. Pemerintahnya terus melakukan perkembangan kualitas sumber daya manusianya, melalui pendidikan dengan menganggarkan 2,4 trilliun Bath atau setara dengan 800 trilliun rupiah. Alokasi anggaran ini merupakan alokasi anggaran terbesar pada Kementerian Pendidikan yaitu sekitar 19.18 % dari seluruh total anggaran belanja pemerintah Thailand yang dialokasikan dengan membantu rakyatnya untuk sekolah gratis 12 tahun dari sejak <i>Prathom</i> 6 tahun <i>Mattayom</i> 6 2. Pendidikan yang dimiliki menjadi modal masyarakatnya dalam	Pendiidkan seluruhnya sama-sama di biyai oleh pemerintah guna meningkatkan SDM Bangsanya.

	pembangunan Ekonomi makro.		mendapatkan gaji dengan bekerja berdasarkan kualifikasi akademik	
2. Nilai Balikan Pendidikan	Pendidikan relatif lebih tinggi dari pada investasi modal fisik yaitu 20% berbading 15%.	Pendidikan relatif lebih tinggi dari pada investasi modal fisik yaitu 20% berbading 15%.	Pendidikan relatif lebih tinggi dari pada investasi modal fisik yaitu 20% berbading 15%.	Pendiidkan seluruhnya sama-sama di biyai oleh pemerintah guna meningkatkan SDM Bangsanya. Hanya nilai mata uangnya yang berbeda beda, dan Jepang nilai mata uangnya lebih tinggi sehingga terkesan lebih sejahtera
3. Fungsi Non Ekonomis Dalam Investasi	1. Penilaian jiwa sosial manusia dan etika masuk dalam domain kriteria penilaian akademik pada semua jenjang pendidikan yaitu domain nilai Afektif 2. Pusat kepemimpinan dengan presiden, dengan	1. Di tahun-tahun awal, pendidikan lebih difokuskan untuk membentuk karakter, mengajarkan sopan santun, menghormati orang lain, menjadi murah hati, empati bahkan diajarkan bersikap lembut terhadap hewan dan	1. Lembaga memberikan pendidikan di semua tingkatan diharapkan mematuhi standar pendidikan nasional, yang terdiri kategori Memenuhi karakteristik rakyat Thailand, baik sebagai warga negara maupun	Fungsi Non Ekonomis Dalam Investasi juga berperan aktif dapat menumbuhkan Kemanusiaan, politis, budaya dan kependidikan seseorang, perbandingannya

	ideologi pancasila, sehingga nilai-nilai demokratis sangat kental pada bangsa ini. 3. Semakin banyak orang yang berpendidikan akan lebih mudah terjadinya akulturasi budaya yang selanjutnya akan terjadi integrasi budaya nasional atau regional di Indonesia 4.	alam. Etika dan Kedisiplinan siswa ini sudah berada pada usia tiga tahun sampai 10 tahun, yaitu awal anak-anak diberikan pemahaman yang penting berkaitan dengan tata cara berperilaku sehari-hari, maka nanti akan mengikuti penerapan IPTEK (Ilmu pengetahuan dan teknologi) secara baik pula karena setelahnya baru pendidikan dasar sampai perguruan tinggi 2. Di Jepang pusat politipisme masih menggunakan Kekaisaran Jepang, oleh karena itu berpegang teguh pada pengaruh pemikiran dari konfusianisme. ideologi pemerintahan monarki konstitusional atas dasar nilai luhur Keputusan tertinggi dan segala pengambil keputusan	sebagai anggota masyarakat dunia. 2. Jiwa Patriotisme, kesadaran akan tanggung-jawab dan komitmen sebagai warga negara Thailand dan anggota komunitas dunia, dan kepatuhan terhadap kehidupan demokratis dan bentuk pemerintahan di bawah monarki konstitusional 3. Fleksibilitas kurikulum memungkinkan integrasi budaya dan kearifan lokal sehingga konsisten dengan standar keluaran pembelajaran. Dengan diterapkannya wajib belajar, dan telah dirumuskan dalam kurikulumnya telah ditetapkan dasar tujuan capaian pendidikan nomor lima bahwa	antara tiga negara Indonesia, Jepang, dan Thailand dapat dikatakan sama-sama positif
--	--	--	--	---

		dan tindakan berada dalam kewenangan Kaisar Jepang 3. Di Jepang Pendidikan tentang seni sangat diterapkan pada siswa Jepang, agar mereka mencintai budaya tradisional negara sendiri	Kesadaran akan perlunya melestarikan budaya	
MUTU PENDIDIKAN 1. Masukan	1. Di Indonesia proses seleksi, rekrutmen dan penempatan tenaga guru dan staf adalah seleksi dan rekrutmen melalui ketetapan pemerintah bagi yang PNS dan melalui kebijakan pimpinan setempat bagi swasta atau non PNS disesuaikan dengan spesifikasi dan spesifikasinya. Adapun proses pengembangan SDM dilakukan melalui pelatihan sistem pengujian, peningkatan	1. Pemerintah Jepang memastikan semua sekolah di tiap daerah mendapatkan pendanaan dan dukungan yang sama dari pemerintah baik pada SDM maupun mutu masukan material.	1. Sistem perekrutan guru dilakukan secara tersentralisasi secara terbuka dimana calon mengetahui syarat-syarat akademik dan non-akademik yang diminta. Ujian saringan penerimaan guru dilakukan secara serentak di berbagai wilayah di Thailand. Peningkatan kualitas guru dilakukan dengan berbagai program seperti program pendidikan guru 5 tahun dengan beasiswa guna menarik calon-calon guru yang cemerlang. Kantor	Segala mutu masukan pendidikan mengacu pada standar mutu negara masing-masing

	kedisiplinan guru dan karyawan 2. Masukan material berupa alat peraga, buku-buku, kurikulum, prasarana, sarana sekolah, dan lain-lain. Disediakan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan		Komisi Guru Negeri dan Pegawai Sekolah bertanggung-jawab mengevaluasi kebutuhan guru dan merekrut guru secara nasional setiap tahun 2. Segala fasilitas sarana dan prasarana sekolah negeri seluruhnya berasal dari Pemerintah 3. Sekolah-sekolah mengusulkan kebutuhan pembiayaan kepada Dinas Pendidikan Wilayah, yang selanjutnya setelah dikompilasi oleh Dinas akan diteruskan Kantor Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar atau Kantor Pelayanan Pendidikan Sekolah Menengah tergantung jenjang sekolahnya. Setelah Kantor Pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah ini	
--	---	--	--	--

			melakukan kompilasi dari seluruh wilayah, usulan diteruskan ke Kementerian Pendidikan, Selanjutnya usulan ini disampaikan pada sidang kabinet. Persetujuan besaran usulan anggaran dari setiap kementerian baru akan sah setelah mendapat persetujuan dari parlemen Thailand.	
2. Proses	1. Mutu efektifitas proses pembelajaran menggunakan metode yang dapat mengaktifkan dan memandirikan siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan metode pendekatan <i>Student Active Learning</i>. 2. Mutu kurikulum di Indonesia dengan melakukan tinjauan terus menerus sesuai perkembangan dan kebutuhannya	1. Kementerian Pendidikan membuat keputusan nasional terkait kebijakan pendidikan 2. Memberikan otonomi yang luas bagi tiap sekolah di daerah untuk menyusun kurikulum dan sistem penilaiannya sendiri 3. Menerapkan <i>Student Centered Learning dalam proses pembelajaran</i> 4. Murid juga dididik untuk belajar secara independen	1. Perluasan wajib belajar sampai pendidikan menengah pertama dan pendidikan gratis sampai jenjang pendidikan menengah atas. 2. Reformasi kurikulum pendidikan dasar, pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat 3. Pendirian Kantor Standar Pendidikan Nasional dan Penilaian Kualitas (Office	Segala mutu proses pendidikan mengacu pada standar mutu negara masing-masing

		dan berperan aktif dalam perkembangan akademik 5. Sekolah juga tidak lagi membebankan tugas administrasi seperti membuat soal ujian dan melakukan penilaian. 6. Untuk meringankan beban guru, pekerjaan administrasi disederhanakan dengan adopsi <i>Learning Management System</i> di setiap sekolah. Jepang bahkan mulai memperkenalkan robot sebagai asisten guru	for National Education Standards and Quality Assessment, ONESQA), yang bertanggung jawab terhadap pengendalian kualitas eksternal	
4. Luaran dan Dampak	Prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses sekolah diukur dari kualitas sekolah, efektivitasnya, produktivitasnya, inovasinya dan moral kerjanya baik yang akademik maupun yang non akademik	Mutu pendidikannya yang baik akan berimplikasi positif terhadap mutu lulusan di Jepang, yang mata para lulusannya berkiprah di kancah dunia	Kebanyakan mereka telah berkontribusi terhadap negaranya, bahkan ke manca negara, salah satu lulusannya ada yang telah bekerja dan menjadi pejabat tinggi di kementerian, dan begitu juga pada instansi negeri maupun swasta	Segala mutu lulusan pendidikan mengacu pada standar mutu negara masing-masing

BAB 5

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah erdapat hubungan antara Investasi pendidikan pada sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu pendiidkan global. Disamping itu dapat di simpulkan pada data kualitatif bahwa investasi pendidikan pada sumber daya manusia terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas tersebut dikarenakan memiliki keterampilan yang diperoleh dari pendidikan baik di negara Indonesia, Jepang maupun Thailand. Disamping itu juga pendidikan life skill dan broad based education yang dikembang Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik dibidang lain. Nilai balik pendidikan ini merupakan perbandingan antara total biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pendidikan dengan total pendapatan yang akan diperoleh setelah seseorang lulus dan memasuki dunia kerja, adapin pada aspfek fungsi non ekonomis Dalam Investasi juga berperan aktif dalamt menumbuhkan Kemanusiaan, politis, budaya dan kependidikan seseorang di negara Indonesia, Jepang dan Thailand.

Adapun mutu pendidikan yang mengacu pada mutu masukan, mutu proses, mutu luaran dan dampaknya pada tiga negara yaitu Indonesia, Jepang, dan Thailand semua mengacu pada mutu pendidikan yang ditetapkan pada standar mutu negara masing-masing, dan seluruh data yang terkumpul menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia, Jepang, dan Thailand telah memenuhi standar mutu yang berlaku, sesuai pada ke khasan dan falsafah pendidikan masing-masing negara

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, Z. (2012). ANALISIS PRODUKTIFITAS INVESTASI SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI SARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI KOTA JAMBI. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, April, Article April. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v0iApril.551>
- Barba, C., Garcia, A., Clay, O. J., Wadley, V. G., Andel, R., Dávila, A. L., & Crowe, M. (2021). Quality of Education and Late-Life Cognitive Function in a Population-Based Sample From Puerto Rico. *Innovation in Aging*, 5(2), igab016. <https://doi.org/10.1093/geroni/igab016>
- Chenery, H. B., Srinivasan, T. N., Behrman, J. R., Rodrik, D., & Rosenzweig, M. R. (Ed.). (1988). *Handbook of development economics*. North-Holland ; Sole distributors for the U.S.A. and Canada, Elsevier Science Pub. Co.
- Eliza, Y., Adriani, E., & Maryanti, S. (2019). The Analysis Return on Investment Education of Married Woman in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 3(14), 667–688. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i14.4346>
- Fajar, C. M., & Mulyanti, D. (2019). Meningkatkan Taraf Perekonomian dan Kesejahteraan Melalui Perencanaan Investasi Pendidikan. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.31294/jabdinas.v2i1.4971>
- Human Capital Investment and Local Development in Digitalization Era – Dimensions*. (t.t.). Diambil 15 April 2023, dari https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1155989173?search_mode=content&search_text=educational%20investmen&search_type=kws&search_field=full_search&or_facet_open_access_status=gold
- Nations, U. (2022). Human Development Report 2021-22. Dalam *Human Development Reports*. United Nations. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22>

- Rasyid, H. (2015). MEMBANGUN GENERASI MELALUI PENDIDIKAN SEBAGAI INVESTASI MASA DEPAN. *Jurnal Pendidikan Anak*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.21831/jpa.v4i1.12345>
- Sagala, S. (2004). *Manajemen berbasis sekolah dan masyarakat: Strategi memenangkan persaingan mutu* (Cet. 1). Nimas Multima.
- Sari, A. (2013, April 1). ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN UPAH TERHADAP PENGANGGURAN TERDIDIK DI SUMATERA BARAT. <https://www.semanticscholar.org/paper/ANALISIS-PENGARUH-TINGKAT-PENDIDIKAN%2C-PERTUMBUHAN-Sari/f9638c4463a224c06f778a1526275c62dbdac20b>
- Tilaar, H. A. R. (1999). *Education, culture, and the Indonesian civil society: Indonesian education reform policies for the Third Millennium*. Remaja Rosdakarya; Lembaga Pengembangan Manajemen Pendidikan, IKIP Jakarta.
- Aniswita. (2021). Sistem Pendidikan Jepang: Studi Komparatif Perbaikan Pendidikan Indonesia. *Dewantara*, 10.
- AR. (2023, Juli 8). Investasi Pendidikan, SDM, Mutu Pendidikan di Indonesia. (Pujiati, Pewawancara)
- Dedi Presli Halawa, M. S. (2023). PERBANDINGAN SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA DAN JEPANG. *JURNAL PENDIDIKAN DAN HUMANIORA*, 1.
- Denim, S. (2006). *Visi Baru Manajemen Sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Depdikbud. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dr. Ir. Yunardi, M. (2020, Juli 22). *Atase Pendidikan KBRI Bangkok*. Dipetik juni 22, 2023, dari informasi akademik: <https://atdikbudbangkok.org/informasi-akademik/>
- Foreducation, A. (2021, 10 6). *sistem pendidikan di jepang*. Dipetik 910 2023, dari sistem pendidikan di jepang:

- <https://acerforeducation.id/edukasi/sistem-pendidikan-di-jepang/>
- Gunaharja, S. (1993). *Pengembangan Sumber Daya Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Ican. (2023, 1 3). Dipetik 9 10, 2023, dari Education Consultant: <https://ican-education.com/blog/sistem-pendidikan-di-jepang/>
- Montanesa, F. d. (2021). Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Jepang. *Edukatif : Jurnal Ilmu Pendidikan*, 178.
- Munandar, A. S. (1981). *Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Djaya Pirusa.
- Ningrum, N. S. (2017). Perilaku Guru dalam Pendidikan di Sekolah dan di Juku yang Digambarkan dalam Film Birigyar. *Jurnal Pendidikan Bahasa Jepang*, 493.
- Nurulfalik. (2004). *Pendidikan dan Investasi*. Bandung: Teropong Suplemen Pikiran Rakyat.
- PJ. (2023, Juni 12). Investasi Pendidikan, SDM, Mutu Pendidikan. (A. Rusdiani, Pewawancara)
- Putri, R. D. (2023, Juli 10). Investasi Pendidikan, SDM, Mutu Pendidikan di Indonesia. (A. Rusdiani, Pewawancara)
- RK. (2023, 9 10). Penelitian International. (Atik, Pewawancara)
- sagala, S. (2009). *Manajemen Strategi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- SS. (2023, Juli 23). Nila iBalikan Pendidikan. (A. Rusdiani, Pewawancara)
- Sudrajat, H. (2005). *Manajemen Mutu Bersbasis Sekolah: Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi KBK* . Bandung: Cipta Lekas Grafika.
- Syamsurrijal, A. (2021). Komparasi Pendidikan Karakter Indonesia dan Jepang (Analisis terhadap Landasan, Pendekatan, dan Problematikanya). *Fitrah : Journal of Islamic Education*, 12.
- system, J. e. (2021, 10 22). *apanese education system*. Dipetik 9 10, 2023, dari apanese education system: <http://www.japan-guide.com/e/e2150.html>
- UPI, T. d. (2009). *Manajeme Pendidikan*. Bandung : Alfabet.

- Usman, H. (2009). *Manajemen (Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widiuseno, I. (2018). "Pola Budaya Pembentukan Karakter dalam Sistem Pendidikan di Jepang. *Kiryoku*, 6.